

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak masa reformasi dan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, memberikan peluang bagi tiap daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingannya. Hal tersebut telah dipaparkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Pemerintah Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Namun dengan adanya pemberian otonomi daerah tidak menjamin semua permasalahan bangsa akan teratasi, oleh sebab itu harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik merubah format lembaga dengan memperbaharui alat-alat yang mendukung untuk berjalannya lembaga-lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga sesuai dengan cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance*.²

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pemerintah daerah akan lebih optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup. Namun hal tersebut harus berlandaskan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya

¹UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, h. 3.

²Sony Yuwono, dkk. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 53.

disesuaikan dengan kewenangannya. Hak daerah adalah mendapat sumber keuangan, antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah, kewenangan untuk memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, mendapatkan hasil kekayaan daerah, dan mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan.

Dalam undang-undang tentang keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu :

Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan keuangan pemerintah daerah, hal tersebut tercantum dalam UU mengenai pemerintah daerah.³

Pelimpahan wewenang yang terjadi di daerah memberikan dampak yang besar dalam pengelolaan keuangan khususnya dalam bidang publik. Lembaga pendidikan yang merupakan lembaga sektor publik memiliki masalah tentang pengelolaan keuangan ataupun pembiayaan pendidikan yang dituntut untuk melibatkan peran para pemangku kepentingan yaitu orang tua siswa, warga sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pada BAB XIII mengenai Pendanaan Pendidikan, bagian ketiga tentang Pengelolaan Dana

³*Ibid*, hal. 53.

Pendidikan Pasal 48 ayat (1) berbunyi bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.⁴ Artinya pengelolaan dana dalam pendidikan yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat akan mengetahui kemana sajakah dana sekolah itu dibelanjakan.

Fakta yang terjadi di lapangan mengenai pola pembiayaan pendidikan setelah diberlakukannya otonomi daerah, yaitu:

1. Pelimpahan keuangan dari Pusat ke Daerah dalam rangka pengelolaan sektor pendidikan baru mencapai taraf pemenuhan kebutuhan operasional, khususnya gaji pegawai.
2. Secara relatif, kemampuan Pemda untuk membiayai sektor pendidikan tidak mengalami perbaikan dengan diberlakukannya otonomi daerah, bahkan tidak sedikit daerah yang justru mengalami penurunan.
3. Masalah utama pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah adalah rendahnya akuntabilitas publik, baik di level Pusat dan Daerah.⁵

Masih menurut Indra Bastian, bahwa selama ini, sekolah- sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Diharapkan sekolah memiliki laporan pertanggungjawaban sekolah mengenai pengelolaan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan *surplus*, defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh tiap siswa. Jadi, pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap siswa dalam setiap semester, bulan dan tahunnya.⁶

⁴ UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 2003), h. 33.

⁵ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.160.

⁶ *Ibid*, h.52.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti, mengenai penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip transparansi, yaitu di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dalam penyusunan keuangan baru melibatkan tim manajemen sekolah (Yayasan, Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala keuangan, dan kepala bagian umum), namun dalam penyusunan kebutuhan anggaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah, pihak guru dan karyawan membuat usulan anggaran yang akan dimasukkan ke RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Dalam pelaksanaan anggaran sekolah pihak guru, karyawan, dan komite hanya mengetahui anggaran kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Dalam evaluasi anggaran secara umum, sekolah tidak melibatkan guru, karyawan, dan orang tua, tetapi mereka hanya mengetahui hasil evaluasi anggaran kegiatan sekolah dan laporan pengeluaran. Proses perencanaan anggaran keuangan sekolah hanya dilakukan oleh pihak internal sekolah. Guru, karyawan, dan orang tua tidak mengetahui secara jelas mengenai sumber pendapatan dana yang diterima dan dikeluarkan oleh sekolah.

Pihak sekolah belum memiliki media atau papan informasi mengenai penggunaan dana sekolah dan dana BOS, serta dalam penerapan prinsip akuntabilitas, yaitu kurangnya keterlibatan dan pengetahuan sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah dan laporan keuangan hanya diberikan kepada Sekolah internal yaitu, yayasan dan tim manajemen sekolah serta sekolah tidak memberikan laporan keuangan sekolah kepada pihak orang tua.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan penelitian yang dilakukan fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelumnya melakukan observasi. Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di SMP AL-Kautsar Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif diskriptif ini sesuai dengan fokus penelitian maka agar lebih lebih memudahkan peneliti mengembangkan teori akan dipusatkan bagian terpenting dari prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan:

- a. Prinsip-prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SMP Al-kautsar Bandar Lampung.
- b. Prinsip-prinsip transparansi Pengelolaan Keuangan SMP Al-kautsar Bandar Lampung.

C. Rumusan Masalah

Masalah adalah “ adanya pengelolaan yang baik antara *dassolen* (yang seharusnya) dan *dassein* (kenyataan yang terjadi):⁷Berdasarkan latar belakang

⁷ Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998) cet 1, h.68

masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di SMP Al Kautsar Bandar Lampung ?
- b. Bagaimana Prinsip Transapatsansi Pengelolaan Keuangan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, maka penulis mengambil tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan memahami Prinsip Akuntabilitas Keuangan di SMP Al Kautsar Kota Bandar Lampung.
- b. Mengetahui dan memahami Prinsip Transaparansi pengelolaan keuangan di SMP Al Kautsar Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Teoritis

Bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah.

- b. Praktis

Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah, sehingga penulis dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari.

Bagi Sekolah Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan kebijakan untuk memberikan pembinaan tentang penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah.



BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, maka pihak sekolah perlu mempertanggungjawabkan pemakaian sumber dana yang telah dikelolanya. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁸

Menurut Sony Yuwono dkk, “Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang memiliki makna bahwasannya proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.” Lebih lanjut Finner dalam Nico menjelaskan “Akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi.”

Sedangkan menurut Mckinsey dan Howard dalam Akdon menyatakan bahwa “Akuntabilitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki

⁸Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Pada Era Otonomi Daerah (Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), h. 45.

dan menggunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan, dan pada kenyataannya memang terbatas oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam institusi yang bersangkutan.”⁹

Lebih lanjut Sri Minarti menjelaskan bahwa, “Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.”³⁵

Miriam Budiarto dalam Sutedi menjelaskan bahwa, “Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.”¹⁰ Mahmudi mengatakan, “Akuntabilitas finansial, yaitu setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.”¹¹

E. Mulyasa mengemukakan akuntabilitas adalah, “pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.”¹²

Dari beberapa pemaparan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah

⁹Sony Yuwono, dkk., *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 59.

¹⁰Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 23.

¹¹Akdon, *Strategic Management For Educational Management*, (Bandung: Alfabeta, 2006) h. 208.

¹²E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 177-178.

yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

2. Asas-asas Akuntabilitas

Sedarmayanti mengatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.¹³

Dalam buku kajian kebijakan *good local governance*, dijelaskan bahwa asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan

¹³Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik"*, (Bandung: Mandar Maju, 2012) h. 70-71.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas-asas akuntabilitas merupakan asas pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemegang keputusan sehingga hasil yang diharapkan akan tercapai dan dapat dilaporkan kepada Sekolah.

3. Tujuan Akuntabilitas

Dalam buku MBS di SMP pada era otonomi daerah, dikemukakan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sekolah.⁴¹ Menurut Herbert, Killough, dan Stretss dalam Waluyo, manajemen suatu organisasi harus "*accountable*" untuk:

- a. Menentukan tujuan yang tepat.
- b. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- c. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
- d. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.¹⁵

Dari adanya uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

¹⁴Kajian Kebijakan *Good Local Governance* Dalam Optimalisasi Pelayanan Publik: Suatu Evaluasi Implementasi Pelayanan Terpadu di Kabupaten/Kota di Indonesia, (Bandung: PKP2AI-LAN, 2007) h. 17.

¹⁵Waluyo, *Manajemen Publik*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 197.

akuntabilitas menciptakan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan.

4. Manfaat Akuntabilitas

Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk:

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
- b. Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat.
- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
- f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
- g. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

¹⁶Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 23-24.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat menjamin kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif.

5. Macam-macam Akuntabilitas

Dari sudut pandang fungsional, J.D Stewart mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima jenis, yaitu:

- a. *Policy Accountability*, yakni akuntabilitas atas pilihan- pilihan kebijakan yang dibuat.
- b. *Program Accountability*, yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektivitas yang dicapai.
- c. *Performance accountability*, yakni akuntabilitas atas pencapaian-pencapaian kegiatan yang efisien.
- d. *Process Accountability*, yakni akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.
- e. *Probity and Legality Accountability*, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dan sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang- undang yang berlaku.⁴⁴

Sedangkan dari sudut pandang akuntansi, *American Accounting* menyatakan bahwa akuntabilitas dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

- a. Sumber daya finansial.
- b. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif.
- c. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan.
- d. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat, dan efektivitas.¹⁷

Namun dalam bidang pendidikan, akuntabilitas pendidikan secara umum dibagi dua, yaitu akuntabilitas manajemen pendidikan dan akuntabilitas pengelolaan dana.

- a. Akuntabilitas manajemen pendidikan termaktub dalam dalam pasal 54, yaitu adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pendidikan. Peran serta tersebut mencakup penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- b. Akuntabilitas dana tertuang dalam Pasal 46-48. Pasal 46 disebutkan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara itu, dalam pasal 47 disebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Kedua pasal tersebut secara tegas memaksa pengelola sekolah agar mampu menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang menyatakan bahwa dana pendidikan telah dikelola secara efisien dan adil, serta dilaporkan

¹⁷Arja Sadjiarto, "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 No. 2, Nopember 2003, h. 140.

secara transparan.¹⁸

Dari pendapat para ahli mengenai macam-macam akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas terhadap kebijakan, pertanggungjawaban keuangan, dan pencapaian atas hasil program/kegiatan.

6. Indikator Tercapainya Akuntabilitas

Terdapat beberapa tahapan untuk menjaminkannya akuntabilitas terlaksana, yaitu:

a. Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- 1) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
- 2) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*.
- 3) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku.
- 4) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.

¹⁸Ratna Wulaningrum, "Partisipasi Pegawai dalam Penyusunan Anggaran Sekolah – Studi Kasus Pada SMP Negeri 10 Samarinda", Jurnal Eksis, Vol. 7, No.2, Agustus 2011.

5) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.¹⁹

b. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

- 1) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
- 2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- 4) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.²⁰

Sedangkan indikator akuntabilitas dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* yaitu, a) akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan, b) pertanggungjawaban kinerja, c) intensitas penyimpangan, dan d) upaya tindak lanjut penyimpangan.⁴⁹

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator akuntabilitas merupakan ukuran yang dapat digunakan sekolah untuk menentukan tingkat kinerja dan membuat masyarakat sekolah puas dengan hasil kerja yang dicapai

¹⁹Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 398-399.

²⁰*Ibid.*

oleh sekolah.

B. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Dengan diterapkannya manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, pihak sekolah harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Menurut Mardiasmo, prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*.²¹ Sama halnya dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, sekolah juga harus menjalankan pengelolaan keuangannya dengan memakai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi.

Menurut Sony Yuwono, Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran.²² Senada dengan Mardiasmo, transparansi adalah “Keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah.”²³

Lebih lanjut Edah Jubaedah menyatakan bahwa, “Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

²¹Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002)h. 105.

²²Sony Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 58.

²³*Opcit.*, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, h. 105

penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.”²⁴

Transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga tercipta lembaga pendidikan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan bersama.²⁵

Holzner menjelaskan bahwa, “*Transparency is a value likely to change the relation between citizens and authorities, between professionals and their clients or patients, and between corporation and theirs workers, customers, investors, and communities.*”²⁶ Dapat diartikan bahwa transparansi adalah nilai yang dapat mengubah hubungan antara warga Negara dan pemerintah, antara professional dan pelanggan mereka, dan juga antara perusahaan dengan pelanggan, investor, dan masyarakatnya.

Sedangkan Nico Adrianto menyatakan bahwa, “Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.”²⁷ Lebih lanjut Sutedi mendefinisikan, “Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

²⁴Edah Jubaedah, Nugraha Lili, dan Hariz Faozan, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota*, (Bandung: PKP2AI LAN, 2008), h.57-58.

²⁵Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2006) h. 4.

²⁶Holzner, *Transparency in global change: the vanguard of the open society*,(USA: Pittsburgh Press, 2006), h.114.

²⁷Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 20.

informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.²⁸

Selanjutnya Sri Minarti menyatakan bahwa, “Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak- pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.”²⁹

Lebih lanjut Nico Adrianto menjelaskan bahwa, “Transparansi anggaran didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat dalam hal fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.”³⁰

Lebih lanjut menurut Albert van Zyl dalam Nico, “... Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu.”³¹

Dari beberapa pemaparan para tokoh mengenai definisi transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan antara para pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan

²⁸Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 399.

²⁹Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 224.

³⁰Opcit., *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, h. 20.

³¹*Ibid.*, h. 21.

oleh suatu organisasi; sedangkan definisi transparansi keuangan menurut beberapa para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan sekolah adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah memberikan makna bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sekolah memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran karena melibatkan aspirasi dan kepentingan bersama, terutama untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik.

2. Asas-asas Transparansi

Dalam peraturan daerah kabupaten Bandung Nomor 01 tahun 2004 BAB II tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup transparansi Bagian Pertama asas dan tujuan transparansi Pasal 2, menyatakan bahwa transparansi berasaskan kepada:

- a. Keterbukaan, melalui informasi publik yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- b. Kepatuhan, dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan hak azasi, pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- c. Fasilitasi, dengan memberikan informasi yang cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana kecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.³²

Selain itu dalam peraturan daerah kabupaten Lebak Nomor 6 tahun 2004

³²Modul 1: Transparansi dan Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, (Jakarta: BEC-TF, 2010).

tentang transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan di kabupaten Lebak, BAB II asas dan tujuan transparansi dan partisipasi, Bagian Kesatu Asas Pasal 2, menyatakan asas transparansi meliputi:

- a. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.
- b. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam huruf (b) adalah informasi yang apabila dibuka akan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan publik.³³

Sedangkan dalam peraturan daerah kabupaten Garut nomor 17 tahun 2008 tentang transparansi dan partisipasi publik, menyatakan bahwa pemanfaatan transparansi dan partisipasi publik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokratis serta tidak bertentangan dengan hak-hak jabatan publik dan hak perseorangan.

Dari ketiga peraturan daerah di atas mengenai asas-asas transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa asas-asas transparansi meliputi keterbukaan akan informasi yang disampaikan kepada publik, pemanfaatan informasi yang diberikan kepada publik, dan hasil yang disampaikan secara tepat waktu.

³³Modul 1: Transparansi dan Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, (Jakarta: BEC-TF, 2010).

3. Tujuan Transparansi

Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh Sekolah dan lembaga adalah:

- a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan- peyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
- b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
- c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
- d. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.
- e. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal.³⁴

Dalam modul komunitas mengenai transparansi akuntabilitas, dijelaskan bahwa penerapan transparansi & akuntabilitas bertujuan agar masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.³⁵

Warren Bennis mengemukakan bahwa tujuan transparansi, yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerja

³⁴ Modul Khusus Komunitas: Transparansi Akuntabilitas, h. 8 (www.p2kp.org), diakses tanggal 07 Juni 2015, Pukul 13.25 WIB.

³⁵ ²² *Ibid.*,

sama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan.³⁶

Mardiasmo dalam Simsom Werinom mengemukakan, bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu:

- a. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran.
- b. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses.
- c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d. Terakomodasinya usulan/suara rakyat.
- e. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik.³⁷

Dari adanya uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya tujuan.

4. Manfaat Transparansi

Menurut Sri Minarti, “Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.”³⁸

³⁶Warren Bennis, dkk, *Bagaimana Pemimpin Menciptakan Budaya Keterbukaan*, Terj. Irene Yovita, (Jakarta: Libri, 2009) h.103.

³⁷Simsom Werinom, dkk, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan*, (Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X, 2007), h. 8.

³⁸Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 224.

Sedangkan Nico berpendapat bahwa, beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah korupsi.
- b. Lebih mudah mengidentifikasn kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu „mengukur“ kinerja lembaga.
- d. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- e. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.³⁹

Dari pendapat para ahli mengenai manfaat transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya transparansi merupakan suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindak kecurangan.

5. Indikator Tercapainya Transparansi

Menurut IDASA yang dikutip oleh Nico bahwa keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

³⁹Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 21.

a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.

- 1) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
- 2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
- 3) Adanya basis legal untuk pajak.
- 4) Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
- 5) Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.

b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.

- 1) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran).
- 2) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
- 3) Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
- 4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.

5) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.

c. Adanya audit yang independen dan efektif.

1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.

2) Adanya kantor statistic yang akurasi datanya berkualitas.

3) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.

d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

1) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.

2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.⁴⁰

Sedangkan menurut Sutedi, indikator tercapainya transparansi secara ringkas dapat diukur melalui:

a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.

b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.

⁴⁰Akdon, *Strategic Management For Educational Management*, (Bandung: Alfabeta, 2006) h. 208.

- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam melayani kegiatan.⁴¹

Sedangkan indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance*, yaitu:

- a. ketersediaan payung hukum bagi akses informasi public.
 b. ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi.
 c. ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi public.
 d. ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada public.
 e. kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi publik.⁴²

Dari pendapat para ahli mengenai indikator pencapaian transparansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pencapaian transparansi lembaga pendidikan (sekolah) dapat melakukan keterbukaan atas berbagai aspek pelayanan, melibatkan semua Warga Sekolah dalam proses anggaran maupun kegiatan yang dilaksanakan sekolah, memiliki sarana untuk menyumbangkan aspirasi Warga Sekolah, dan memiliki aturan dalam melaksanakan kegiatan.

C. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan adalah keuangan dan pembiayaan. Karena tanpa

⁴¹Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 400.

⁴²Edah Jubaedah, Nugraha Lili, dan Hariz Faozan, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/kota*, (Bandung: PKP2AI LAN, 2008), h. 66.

adanya sumber dana organisasi tidak akan mampu menjalankan tugas dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Menurut E. Mulyasa, otonomi sekolah yang diterapkan melalui manajemen berbasis sekolah, menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat.⁴³

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Dalam dunia bisnis, masalah mengelola keuangan sangat penting, seperti halnya masalah produksi dan pemasaran dalam mencapai tujuan organisasi. Kegagalan dalam memperoleh dana dapat mempengaruhi kegiatan operasional sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan hidup organisasi. Dari penggambaran tersebut, tampak bahwa pengelolaan keuangan memberi pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Sri Minarti, “Pengelolaan ataupun manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.”

Lebih lanjut H.M. Levin sebagaimana dikutip oleh Uhar Suharsaputra menyatakan bahwa, *“school finance refers to the process by which tax revenues and other resources are derived for the formation and operation of elementary and secondary schools as well as the process by which those resources are*

⁴³E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 171.

allocated to school in different geographical areas and to types and levels of education”

Dapat diartikan bahwa keuangan sekolah mengacu dari pendapatan dan penerimaan pajak mereka untuk pembentukan dan pengoperasian sekolah dasar dan menengah serta proses sumber daya yang dialokasikan sekolah menurut letak geografis, dan jenis serta tingkat yang berbeda.

Menurut Suad Husnan dalam Suryadi, “Manajemen Keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan; sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.⁵³ James C. Van Horne dalam Kasmir menyatakan bahwa, “Manajemen Keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.”⁴⁴

Sutrisno berpendapat bahwa, “Manajemen Keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.”⁴⁵

Darsono mengatakan bahwa, “Manajemen Keuangan adalah kegiatan memperoleh sumber dana dengan biaya yang semurah-murahnya dan menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk menciptakan laba dan

⁴⁴Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. II, h. 5.

⁴⁵Sutrisno, *Manajemen Keuangan: Toeri, Konsep, & Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 1.

nilai tambah ekonomi.”⁴⁶ Lebih lanjut Mulyono mendefinisikan bahwa manajemen keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/diusahakan secara sengaja dan sungguh- sungguh, serta pembinaan secara kontinyu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan.⁴⁷

Dari pendapat beberapa tokoh di atas mengenai pengertian manajemen keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan sekolah adalah proses mendayagunakan sumber dana yang didapatkan untuk pencapaian tujuan sekolah.

2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan

Manajemen atau pengelolaan keuangan sekolah harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu:

- a. Transparansi berarti keterbukaan, yaitu dalam bidang manajemen keterbukaan terhadap melakukan suatu program atau kegiatan. Dalam lembaga pendidikan sangat diperlukan keterbukaan dalam manajemen keuangan untuk mengetahui sumber pendapat, penggunaan dana, dan pertanggungjawabannya.
- b. Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dapat dinilai oleh orang lain karena hasil kerjanya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Ada tiga pilar utama dalam menciptakan

⁴⁶Darsono, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2009),h. 1.

⁴⁷Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2010), h. 181.

akuntabilitas, yaitu adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan komponen sekolah dalam mengelola kegiatan, standar kerja yang dapat diukur dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

- c. Efektifitas adalah penyampaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam manajemen keuangan dikatakan efektif jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiaya aktivitas sesuai tujuan lembaga dengan keluaran yang diharapkan.
- d. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas dari hasil kegiatan yang dilaksanakan. Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dan keluaran yang meliputi dana, daya, dan waktu. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya, dan hasil.⁴⁸

Di dalam UU No. 17 Tahun 2003, menjabarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara ke dalam asas-asas umum yang telah dikenal dalam pengelolaan kekayaan Negara, seperti:

Prinsip tahunan, prinsip universalitas, prinsip kesatuan dan prinsip spesialisasi; maupun prinsip-prinsip baru sebagai pencerminan penerapan kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proposionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.⁴⁹

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48, tentang pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas

⁴⁸Jamal Asmani Ma'mur, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, (Jogyakarta: Diva Press, 2012), h. 218-222.

⁴⁹Sonny Sumarsono, *Manajemen Keuangan Pemerintah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 43-44.

publik.⁵⁰ Sedangkan Wijaya menyatakan bahwa, prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan terdiri dari prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum pengelolaan meliputi keadilan, efisien, transparansi, dan akuntabilitas.

- a. Keadilan berarti besarnya dana pendidikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- b. Efisiensi merupakan perbandingan antara *input* dan *output* atau antara daya (tenaga, pikiran, waktu, biaya) dengan hasil.
- c. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan sekolah.
- d. Akuntabilitas berarti penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana sekolah yang ditetapkan.⁵¹

Lebih lanjut Wijaya menjelaskan prinsip-prinsip khusus pengelolaan keuangan meliputi efektivitas, kecukupan, dan berkelanjutan.

- a. Efektivitas diterapkan pada kepala sekolah untuk dapat mengatur keuangan dan membiaya aktivitas sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan.
- b. Kecukupan berarti pendanaan pendidikan mencukupi biaya penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- c. Berkelanjutan berarti pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi

⁵⁰ UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 2003), h. 33.

⁵¹David Wijaya, Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah terhadap Kualitas pendidikan, Jurnal Pendidikan Penabur, No. 13, 2009, h. 86.

Standar Nasional Pendidikan.⁵²

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan meliputi prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Keadilan merupakan dana yang ada disesuaikan dengan tujuan pencapaian kegiatan pendidikan, efisiensi merupakan penetapan masukan dan keluaran sumber dana ataupun sumber daya yang telah dikorbankan, efektivitas merupakan penggunaan dana telah sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan, transparansi merupakan keterbukaan sumber dana yang telah diperoleh, dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban melalui laporan keuangan yang dibuat oleh sekolah.

3. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Tujuan pengelolaan keuangan sebenarnya tercermin dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manajemen keuangan. Dalam hal tersebut kegiatan manajemen keuangan terbatas pada kegiatan terhadap pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan sumber keuangan, perencanaan alokasi keuangan, serta penentuan struktur aktiva, keuangan dan modal perusahaan. Dengan demikian, maka tugas pokok manajemen keuangan adalah merencanakan perolehan dan penggunaan dana tersebut untuk memaksimalkan nilai perusahaan.⁵³

Harmono berpendapat bahwa tujuan pengelolaan keuangan adalah memaksimalkan kekayaan *stakeholders*, yang berarti meningkatkan nilai

⁵²*Ibid.*, h. 87.

⁵³Moeljadi, *Manajemen Keuangan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Malang: Bayumedia, 2006) h.10.

organisasi yang merupakan ukuran nilai objektif oleh publik dan orientasi pada kelangsungan hidup organisasi.⁵⁴

Hermino menyatakan bahwa tujuan manajemen keuangan sekolah yaitu:

- a. Menjamin agar dana yang tersedia digunakan untuk kegiatan harian sekolah dan kelebihan dana yang ada diinvestasikan kembali.
- b. Memelihara barang-barang (asset) sekolah.
- c. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.⁵⁵

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan keuangan sekolah adalah memberikan nilai tambah keuntungan sekolah dalam mendapatkan sumber keuangan, melakukan kegiatan sekolah dengan dana yang tersedia, dan menjamin segala proses pencatatan laporan keuangan.

4. Fungsi Pengelolaan Keuangan

Pada setiap organisasi tentunya mempunyai elemen di bidang keuangan. Bagian tersebut merupakan titik puncak dalam pengambilan keputusan dalam manajemen puncak. Sehingga bagian keuangan sangat bertanggung jawab dalam formulasi kebijakan organisasi.

Di sekolah, orang yang bertugas dalam bidang keuangan di sebut manajer/bagian keuangan. Bagian keuangan biasanya dibantu oleh seorang bendaharawan dan bagian akuntansi. Dengan demikian fungsi bagian keuangan

⁵⁴ Harmono, *Manajemen Keuangan*, (Bandung: Bumi Aksara, 2009), h. 1.

⁵⁵ Agustinus Hermino, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) h. 183.

dipisahkan menjadi dua jabatan, yaitu:

a. Bendaharawan (*treasurer*)

Bendaharawan bertanggung jawab atas perolehan (akuisisi) dana dan pengamanannya disamping itu juga bertanggung jawab dalam hal:

- 1) Pengadaan uang tunai;
- 2) Membuat laporan posisi kas dan modal kerja;
- 3) Menyusun anggaran kas;
- 4) Manajemen kredit, asuransi, dan urusan pensiun.⁵⁶

b. Akuntansi (*controller*)

Bagian akuntansi mempunyai tugas mencatat dan membuat laporan tentang informasi keuangan organisasi. Tanggung jawabnya adalah:

- 1) Menyusun anggaran dan laporan keuangan;
- 2) Urusan penggajian;
- 3) Menghitung pajak;
- 4) Memeriksa *internal Inside Corp.*⁵⁷

Sutrisno berpendapat bahwa, fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan deviden.

- a. Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk- bentuk investasi yang akan mendapatkan keuntungan di masa akan datang.

⁵⁶Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: AR Ruzz Media, 2010), h. 182.

⁵⁷*Ibid.*, h. 182.

- b. Keputusan pendanaan, pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi organisasi guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.
- c. Keputusan deviden merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan keuntungan.⁵⁸

Bafadal dalam Hermino menyatakan bahwa fungsi manajemen keuangan meliputi a) perencanaan anggaran tahunan, b) pengadaan anggaran, c) pendistribusian anggaran, d) pelaksanaan anggaran, e) pembukuan keuangan, dan f) pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.⁵⁹

Dari pendapat para ahli mengenai fungsi manajemen keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengelolaan keuangan sekolah meliputi tahap perencanaan anggaran, pengalokasian anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran.

5. Strategi Pengelolaan Keuangan

Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat melaksanakan kegiatan pendidikan. Bersama dengan unsur administrasi lainnya seperti manusia, fasilitas, teknologi pendidikan, dan dana dapat berfungsi untuk menghasilkan *output* yang akan menunjang keberhasilan pendidikan. Di Indonesia pemenuhan kebutuhan dana pendidikan dipandang sebagai hal yang diperhatikan secara serius

⁵⁸Sutrisno, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 5.

⁵⁹Agustinus Hermino, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 186.

oleh pemerintah pusat dan daerah.⁶⁰ Blocher dalam Idochi Anwar menyatakan, bahwa strategi anggaran merupakan titik awal dalam penyiapan dan pembuatan rencana anggaran suatu institusi.⁶¹

Pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat, baik langsung atau tidak langsung perlu dilakukan dengan baik dengan langkah-langkah sistematis sesuai dengan prinsip manajemen. Hal ini akan terjadi jika pengelolaan berjalan baik serta akuntabel akan menimbulkan berbagai manfaat yang dikemukakan oleh Mintarsih dalam Suharsaputra:

- a. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efektif dan efisien;
- b. Tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (lembaga pendidikan swasta);
- c. Mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, ataupun penyimpangan dana dari rencana semula;
- d. Penyimpangan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan baik sesuai yang diharapkan; apabila kebocoran ini terjadi, maka akan berakibat buruk, baik pada pengelola keuangan atasan langsung dan bendaharawan maupun kepada lembaga pendidikan itu sendiri.⁶²

Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan keuangan pendidikan harus

⁶⁰Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 272.

⁶¹Mochammad Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 214.

⁶²Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 273.

difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, mengawasi pelaksanaan dana, disertai bukti secara administratif dan fisik sesuai dengan dana yang dikeluarkan.

Dalam mengelola keuangan di sekolah tentunya ada tahapan yang harus dilakukan. Adapun tahap-tahap dalam pengelolaan keuangan sebagai berikut:

6. Perencanaan Anggaran

Dalam pengelolaan keuangan, perencanaan merupakan kegiatan merencanakan sumber dana dalam mencapai kegiatan dan tujuan pendidikan di sekolah. Gordon dalam E. Mulyasa mengemukakan bahwa perencanaan penyusunan anggaran pendidikan dalam dua pendekatan yang umum digunakan, yaitu pendekatan tradisional dan *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*.⁶³ Lebih lanjut E. Mulyasa menjelaskan:

Bahwa dalam tahap pendekatan tradisional, guru dengan pasti mengetahui kebutuhan yang terjadi seperti persediaan sumber belajar, serta guru dapat menentukan permintaan anggaran berdasarkan manfaat atas kebutuhan yang diperlukan, dan dapat memperkirakan kategori biaya kebutuhan, misalnya persediaan instruksi, buku, dan lain-lain. Pada tahap PPBS sebaiknya pihak sekolah dapat menilai kebutuhan pendidikan, menentukan kriteria, tujuan, dan metode yang akan dipakai dalam proses evaluasi tujuan pendidikan, menentukan program sesuai dengan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dan mempersiapkan sumber daya yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan program.⁶⁴

Menurut Sri Minarti, perencanaan anggaran sekolah harus disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan

⁶³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 173.

⁶⁴ *Ibid.*,

jangka pendek maupun jangka panjang.⁶⁵ Edy menjelaskan, Anggaran merupakan rencana yang terorganisasi dan menyeluruh, dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu lembaga selama periode tertentu di masa yang akan datang.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan faktor penting dalam menetapkan tujuan yang telah direncanakan sehingga pihak manajemen dapat merealisasikan harapan-harapannya.

Dalam proses penganggaran harus dilakukan secara jujur dan terbuka serta dilaporkan dalam struktur yang dapat dipahami serta terorganisir secara rapi, jelas, rinci, dan menyeluruh. Pada tahap penyusunan anggaran sebaiknya lembaga/organisasi mengembangkan dahulu perencanaan strategis. Dengan adanya perencanaan strategis, maka anggaran menjadi bermakna sebagai alokasi sumber daya (keuangan) untuk mendanai berbagai program dan kegiatan (strategis). Indra Bastian Menjelaskan :

Bahwa suatu rencana anggaran lembaga harus dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan dipublikasikan. Anggaran yang direncanakan merupakan suatu instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik serta pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh dana publik. Dalam bentuk sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.⁶⁷

Perencanaan anggaran pada dasarnya merupakan perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang, dan setiap

⁶⁵Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara mandiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 229.

⁶⁶Edy Sukarno, *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 169.

⁶⁷Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 6.

anggaran yang ditentukan memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode mendatang. Dengan adanya anggaran, lembaga akan mempertanggungjawabkannya melalui pelaksanaan program-program.

Dapat disimpulkan bahwa adanya perencanaan anggaran sekolah dapat menentukan tujuan yang hendak dicapai sekolah dengan efektif dan efisien.

7. Pelaksanaan Anggaran

Setelah perencanaan anggaran telah dibuat, selanjutnya adalah realisasi anggaran tersebut dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan keuangan merupakan penatausahaan keuangan yang mencakup pengurusan operasional dan administrasi, tata cara pembukuan dan pelaporan (pertanggungjawaban) keuangan. Pengelolaan keuangan sekolah memiliki tujuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan dana sekolah, mengetahui penyebab utama biaya yang terjadi di sekolah, memberikan informasi yang akurat, serta memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana serta pelaporannya.⁶⁸

Adapun akuntansi atau pembukuan yang ada di sekolah bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fungsi-fungsi dari adanya sistem pembukuan. Berikut beberapa contoh pembukuan yang biasanya terdapat di sekolah-sekolah:

a. Buku Pos (*Vate Book*)

Buku pos memuat informasi dana yang masih tersisa untuk tiap

⁶⁸Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.136.

anggaran pos. Buku pos mencatat peristiwa-peristiwa pembelanjaan uang harian.

Tabel 2.1
Buku Pos

Pos:	Laboraturium IPA		
Pemeliharaan	8.250.000		
Anggaran:			
Tanggal	Pembelian	Jumlah	Sisa (Rp)
26-02-2017	Mikroskop	3.000.000,00	5.250.000,00
05-03-2017	Alat Pengukur Suhu	100.000,00	5.190.000,00
10-04-2018	Gelas Ukur	550.000,00	2.500.000,00
Dst.			

Sumber: Data diolah dari SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

b. Faktur

Faktur berupa lembaran kertas yang dapat diarsipkan. Faktur berisi rinciang tentang (1) maksud pembelian, (2) tanggal pembelian, (3) jenis-jenis pembelian, (4) rincian barang yang dibeli, (5) jumlah pembayaran, (6) tanda tangan pemberi kuasa.

Tabel 2.2
Pembayaran

Nama Sekolah :	RADEN INTAN		No :
Alamat Sekolah :	LAMPUNG		Tanggal :
Dibayarkan Kepada :			
Bagian :			
Jumlah :	Rp.		
Terbilang :			
Keperluan :			
Direktur	Kasir	Yang Menerima	
_____	_____	_____	

Sumber: Data diolah dari SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

c. Buku Kas

Buku kas mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang tersisa dan saldo secara harian. Contoh buku kas dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Buku Kas

Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kota :
Kegiatan : Bulan:

No. Urut	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp.	Pengeluaran Rp.	Saldo
	01-Mar-17	Saldo Feb 2014			Rp. 10.254.988
791	05-Mar-17	Biaya FC LKS		Rp. 48.750	Rp. 10.206.238
792	05-Mar-17	Iuaran O2SN		Rp. 892.000	Rp. 9.314.238
		Mengetahui, Kepala Sekolah (.....)		Bandar Lapung, Bendahara, (.....)	

Sumber: Data diolah dari SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

d. Lembar Cek

Lembar cek merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah. Lembar cek dikeluarkan bila menyangkut tagihan atas pelaksanaan suatu transaksi.

Tabel 2.4
Lembar Cek

Nama Sekolah :	No. BKM:
Alamat :	Tanggal :
Telepon :	
TANDA TERIMA	
Telah diterima dari :	
Jumlah :	
Terbilang :	
Keperluan :	
Diserahkan Oleh:	Penerima:
.....

Sumber: Data diolah dari SMP Al-Kautsar Bandar Lampung

e. Jurnal

Jurnal merupakan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan setiap hari.

f. Buku Besar

Data keuangan yang terdiri dari informasi dan jurnal dipindahkan ke buku besar atau buku kas induk pada akhir bulan. Buku besar mencatat kapan terjadinya transaksi pembelian, keluar masuknya uang, dan neraca saldonya.

g. Buku Kas Pembayaran Uang Sekolah

Buku kas pembayaran berisi pembayaran tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, jumlah, dan sisa tunggakan

atau kelebihan pembayaran sebelumnya.

h. Buku Kas Piutang

Buku ini berisi daftar/catatan orang yang berhutang kepada sekolah menurut jumlah uang yang terutang, tanggal pelunasan, dan sisa uang yang belum dilunasi.

i. Neraca Percobaan

Tujuan diadakanya neraca percobaan adalah untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca pertanggungjawaban keuangan secara tepat.⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa mengelola pelaksanaan anggaran artinya mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja, serta dapat membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

8. Evaluasi Anggaran

Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, selanjutnya sekolah harus dapat mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah dicapai dengan hasil yang telah dilakukan sesuai tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak- pihak yang berkepentingan (pemerintah, masyarakat, dan wali murid).

Pertanggungjawaban merupakan suatu pembuktian dan penentuan bahwa

⁶⁹Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2010), h. 178-181.

apa yang dimaksud sesuai dengan yang telah dilaksanakan. Evaluasi manajemen keuangan bertujuan untuk terselenggaranya pembiayaan sekolah secara efektif.⁷⁰ Oleh karena itu, manajemen sekolah akan berjalan baik dengan ditunjang oleh kesiapan seluruh komponen- komponen yang ada di sekolah.

Menurut Sri Minarti, adapun faktor-faktor yang harus dimasukkan dalam fungsi evaluasi manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Mengusahakan suatu struktur yang terorganisasi dengan baik dan sederhana untuk menghilangkan salah pengertian antara komponen dalam manajemen sekolah.
- b. Mengusahakan supervisi yang kuat untuk menghilangkan *gap* yang terjadi dalam keseluruhan program sekolah yang menyangkut penganggaran.
- c. Mengusahakan informasi yang akurat dalam rangka pembuatan keputusan dan penilaian terhadap pelaksanaan kerja yang ada korelasinya dengan keuangan sekolah.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses penilaian dalam pencapaian tujuan, artinya menilai pelaksanaan proses pengelolaan keuangan yang terjadi di sekolah, menilai pencapaian sasaran program, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

⁷⁰ Sri Minarti, *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 245.

⁷¹ *Ibid*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 245-246.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan di lembaga sekolah telah penulis telusuri dan amati. Penulis menemukan terdapat karya tulis dan hasil penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis, seperti:

Penelitian yang dilakukan Giyanto dengan judul *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Belah 1 Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan,”* hasil penelitiannya adalah perencanaan dana BOS telah dilaksanakan secara transparan dilihat dari aspek orientasi tujuan, proses penyusunan dan keterlibatan para guru, dan partisipasi komite sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ristya Dwi Anggraini dengan judul *“Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya,”* hasil penelitiannya adalah transparansi pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VII sangat transparan. Hal tersebut dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta informasi yang disediakan mengenai anggaran dana BOS dalam Program RKAS. Dalam akuntabilitas dilihat dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa lampiran formulir BOS. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian

deskriptif.⁷²

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Parwita Desi dengan judul “*Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Banyumas,*” hasil penelitiannya adalah secara keseluruhan, evaluasi atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas telah diselenggarakan secara akurat dan transparan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus.⁷³

Penelitian yang dilakukan oleh Denny Boy dan Hotniar Siringoringo, “*Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) terhadap Partisipasi Orang Tua Murid,*” hasil penelitiannya adalah Sikap akurat dan transparan satuan pendidikan dalam Pengelolaan APBS jika dilakukan baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Jika dibandingkan antara sikap akuntabilitas dan transparansi, pengaruh akuntabilitas lebih kuat dibandingkan pengaruh transparansi terhadap partisipasi orang tua murid. Semakin akurat dan tepat waktu pelaporan penggunaan dana yang dikumpulkan dari orang tua murid, maka akan semakin tinggi partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan penyelenggaraan

⁷²Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 164.

⁷³N. McGinn dan T. Welsh, *Desentralisasi Pendidikan*, Terj. Achmad Syahid (Ciputat: Logos, 2003), h. 86.

pendidikan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kuantitatif.⁷⁴

Dan Penelitian yang dilakukan oleh Rediana Setiyani dengan judul “Pengaruh Prinsip Keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Produktivitas SMK (Kajian Persepsi Guru SMK Se-Kabupaten Kendal),” hasil penelitiannya adalah transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini dikarenakan akses informasi terkait pengelolaan keuangan sekolah tidak mudah untuk didapatkan. Tingkat transparansi ini dapat dilihat bahwa kepala sekolah telah mensosialisasikan dan mempublikasikan program serta kebijakan sekolah kepada orang tua dan anggota komite. Sedangkan pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap produktivitas SMK, yaitu memberikan kepercayaan kepada *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam pendidikan di SMK. Akuntabilitas pengelolaan keuangan di SMK didukung oleh beberapa indikator, meliputi keterlibatan semua pihak dalam penetapan APBS, kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur atau rencana pelaksanaan yang telah disepakati, adanya *output* atau *outcome* yang terukur, laporan keuangan periodik, dan pertanggungjawaban tahunan. Keterlibatan guru dalam penetapan APBS berada pada kategori sering terlibat, yaitu guru dalam satu kompetensi keahlian merencanakan kebutuhan kompetensi keahlian yang merupakan aktualisasi dari program yang akan dilakukan. Metode penelitiannya, yaitu uji pengaruh dengan

⁷⁴R. Edward Freeman, Buku Manajemen Strategik: Pendekatan terhadap Pihak- pihak Berkepentingan Terj. Dari *Strategic Management: A Stakeholder Approach* oleh Rochmulyati Hamzah, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1995), Cet. III, h. 60.

pendekatan kuantitatif.⁷⁵

Dari kelima penelitian terdahulu seperti pemaparan di atas, terdapat kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akan tetapi dari kelima penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan diteliti. Dari penelitian di atas yang dilakukan oleh Diah Parwita Desi, Giyanto, dan Ristya Dwi Anggraini merupakan penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana BOS di sekolah negeri, sedangkan Denny Boy dan Hotniar Siringoringo merupakan analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBS, serta Rediana Setyani meneliti di tingkat SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), yaitu tentang pengaruh prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap produktivitas SMK.

Dari hasil yang peneliti dapatkan bahwa perbedaan yang terdapat dari penelitian sebelumnya khusus mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di sekolah yang dilakukan oleh Diah, Giyanto, Ristya, Denny, Hotniar, dan Rediana bahwa objek penelitiannya terfokus pada anggaran dana APBD, APBS dan dana BOS karena objek yang diteliti merupakan sekolah negeri. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan sekolah swasta yang mendapatkan dana tidak hanya dari pemerintah (dana BOS) melainkan dana yang sebagian besar berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat sehingga proses penganggaran yang dilakukan sekolah

⁷⁵ Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 298

swasta tersebut berbeda dengan sekolah negeri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah kancah, lapangan atau wilayah tertentu.⁷⁶ Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai:

“Akuntabilitas dalam Keuangan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung.”

Adapun tujuan penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang sedang/telah diteliti.⁷⁷

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Rajabasa (Depan Islamic Centre Lampung) Pos. 35144.

Waktu Penelitian :

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 198

⁷⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 18.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Hari/tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Juli 2017	-	Pembuatan Proposal
2.	Jum'at, 18 Agustus 2017	09.30-10-30 WIB	Seminar Proposal
3.	Oktober 2014 – Desember 2015	-	Bimbingan Tesis
4.	18 Agustus 2017	-	Permohonan Izin Penelitian
5.	Agustus – Oktober 2017	-	Pelaksanaan Penelitian
6.	Oktober – November 2017	-	Pengolahan Data

C. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti atau secara *purposive sampling*.⁷⁸ Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan sebagai pengelola sekolah.
2. Individu yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran.
3. Telah menduduki jabatan minimal 1 (satu) tahun.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan unsur-unsur penting yang terkait dengan masalah penelitian, yakni Desy Apriana, S.E, M.Pd Sebagai Kepala Keuangan sekaligus Bendahara SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, Dra. Hj. Sri Purwaningsih, sebagai Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, H. Choirul

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 218.

Saleh, S.S. M.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Rudiyanto, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan Risgianto, S.Pd sebagai salah satu Wali Murid SMP Al-Kautsar Bandar Lampung.

Moleong mengemukakan bahwa "Pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu : (1) tahap sebelum ke lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, (4) tahap penulisan laporan"⁷⁹. Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

- a. Tahap sebelum kelapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat peneliti, mencakup observasi lapangan dan permohonan ijin kepada subyek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kinerja tenaga pendidik dan kinerja tenaga kependidikan di SMP Al-Kautsar.
- c. Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumen maupun wawancara mendalam dengan tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Al Kautsar. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan

⁷⁹Ibid Arikunto .h. 43

makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

- d. Tahap penulisan laporan, meliputi : kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan tesis yang kemudian ditindaklanjuti hasil bimbingan tersebut dengan penulis tesis yang sempurna. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian tesis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang cukup dan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dimana satu sama lain saling terkait dan melengkapi, yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung ke objek penelitian, yaitu SMP Al-Kautsar Bandar Lampung untuk mendapatkan data dilapangan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dan melakukan wawancara kepada informan yang

dilakukan secara *purposive*, yakni pihak informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang masalah dalam penelitian ini, yaitu Desy Apriana, S.E, M.Pd Sebagai Kepala Keuangan sekaligus Bendahara SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, Dra. Hj. Sri Purwaningsih, sebagai Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, H. Choirul Saleh, S.S. M.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Rudiyanto, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan Risgianto, S.Pd sebagai salah satu Wali Murid SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. untuk menjelaskan mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah kepada *stakeholders*. Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Instrumen yang dibawa merupakan pedoman wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, lembar kerja, dan buku catatan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan data penelitian yang diperlukan dan penting untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Studi dokumentasi dapat diperoleh dari laporan pertanggungjawaban sekolah, bukti RKAS (Rencana dan Kegiatan Anggaran Sekolah), laporan pajak ke pemerintah, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan sekolah.

c. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau teori mengenai transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan, dan *stakeholders* dari berbagai sumber, yaitu buku, jurnal, dan hasil penelitian (Tesis)

Dalam membuat kisi-kisi pedoman wawancara, peneliti menggunakan teori dari buku Nico Adrianto yang berjudul “*Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*” dan buku Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Pada Era Otonomi Daerah mengenai indikator tercapainya transparansi, sedangkan dalam membuat indikator tercapainya akuntabilitas menggunakan teori dari buku Adrian Sutedi yang berjudul “*Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*”.

Adapun penjelasan kisi-kisi instrumen wawancara dan studi dokumentasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Kisi-kisi Pedoman Wawancara

No.	Variabel	Aspek Masalah	Butir Soal/Pertanyaan
1	Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah.	1. Kerangka kerja 2. Akses masyarakat 3. Audit yang independen	1,2,3,4 5,6,7,8,9,10,11 13

		dan efektif	
		4. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran	14,15,16
		5. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan Sekolah	17
		6. Meningkatnya kepercayaan <i>stakeholders</i>	18
		7. Meningkatnya partisipasi <i>stakeholders</i>	19
		8. Berkurangnya pelanggaran	20
2	Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah.	1. Dokumentasi dan informasi	21,22
		2. Sesuai standar etika dan nilai-nilai yang berlaku	23,24
		3. Adanya sasaran kebijakan	25
		4. Tolak ukur	26,27
		5. Penyebaran informasi	28
		6. Mekanisme pengaduan masyarakat	29
		7. Ketersediaan sistem	30,31

		informasi manajemen dan Monitoring.	
--	--	-------------------------------------	--

Tabel 3.3

Kisi-kisi Instrumen Studi Dokumen

No.	Dimensi	Sumber Dokumen
1.	Organisasi	Profil sekolah
		Sejarah berdirinya sekolah
		Visi, misi, tujuan, dan sasaran Sekolah
		Struktur organisasi sekolah
		Sarana dan prasarana
2.	Ketenagaan	Data tenaga kependidikan
		Data tenaga pendidik
		Data peserta didik
3.	Keuangan	Laporan Keuangan dan SPJ dana BOS
		RKAS
		Tugas dan Tanggung Jawab Staff Keuangan
		Surat Keputusan Kebijakan Anggaran
		Surat Setoran Pajak
Proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan		

E. Analisis Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif berbeda dengan metode kuantitatif. Ada berbagai macam cara pengujian keabsahan data

dan salah satunya adalah triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi menjadi sangat penting untuk membantu pengamatan menjadi lebih jelas dan terang sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih jernih. Triangulasi merupakan proses validasi yang harus dilakukan dalam riset untuk menguji keabsahan data dengan sumber data yang lainnya.

Untuk analisis data, peneliti akan melakukan analisis data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dokumentasi, serta sumber data yang telah ada untuk dapat disimpulkan. Serta teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasan mengenai reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah membuat kategori berdasarkan macam atau jenis yang sama, membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
2. Penyajian data adalah melakukan penyajian dengan memisahkan pola yang berbeda sesuai dengan jenis dan macamnya sehingga strukturnya mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan adalah kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang merupakan jawaban Rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.⁸⁰

⁸⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 247-253.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan temuan adalah sesuatu yang penting dalam penelitian, karena akan menyamai kepercayaan temuan tersebut dalam memecahkan masalah yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman dalam Manca ada tiga teknik yang digunakan untuk menguji dan memastikan temuan keabsahan data. Diantaranya ; ketepatan data, pengaruh peneliti dan memberi bobot pada bukti.⁸¹

Pengecekan keabsahan data dimaksudkan untuk memberi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan dan apakah penjelasan yang diberikan tentang dunia kenyataan memang sesuai kenyataan yang sebenarnya ada atau yang terjadi. Untuk mempertinggi ketepatan data hasil penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut :

a. Triangulasi

Moleong mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainya.⁸² Triangulasi disamping dengan cara membandingkan dan mengecek balik kepercayaan data yang sama menggunakan sumber informasi yang berbeda. Oleh karena itu pengecekan keabsahan suatu temuan, peneliti selalu menanyakan kembali data penting yang diperoleh dari seseorang informan kepada informan lainnya yang dianggap mengetahui data tersebut.

⁸¹ Manca, op. cit, h. 82

⁸² Moleong, op. cit, h. 78

b. Mengadakan member check

Dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data informasi yang dikumpulkan yang diperoleh peneliti. Dengan kata lain tahap ini merupakan tahap untuk memperoleh kredibilitas hasil penelitian. Mengenai hal ini Moleong mengemukakan bahwa pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data yang sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan, yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data kategori data analisis, penafsiran dan kesimpulan.⁸³ Para anggota yang terlibat mewakili rekan-rekan mereka yang dimanfaatkan untuk memberi reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang tidak diorganisasikan oleh peneliti.



⁸³ Ibid, h.79

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Berdirinya SMP Al Kautsar

Berdasarkan tuntutan umat islam untuk berperan serta mendidik generasi muda islami yang siap berkiprah dalam pembangunan dunia menuju pembangunan negara yang *"Baladatul Toyibatun Warobbun Ghofur"* suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan di ridhoi oleh Allah SWT, serta siap mengisi jiwa dan raganya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mewujudkan tuntutan tersebut di atas, maka kelompok pengajian Al – Amal Lampung mengeluarkan pernyataan kesepakatan atau mandat dengan nomor khusus/ Al Amal/1991 membentuk pengurus Yayasan Al Kautsar Lampung, ditetapkan sebagai pelindung Bapak Poedjono Pranyoto Gubernur KDH Tk I Provinsi Lampung dan ketua Ibu Sri Mulyati Poedjono.¹

Berdasarkan mandat tersebut ketua yayasan mengeluarkan surat keputusan 001/1/SK/YPD/1991 pada tanggal 16 Januari 1991 tentang pembentukan Perguruan Al Kautsar Bandar Lampung, dan berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1497/112.BI/U/1992 pada tanggal 27 Mei 1992, menyetujui pendirian sekolah dengan nama SMP AL Kautsar Bandar Lampung serta berlaku surat TMT 1 Juli 1991 tentang registrasi sekolah.

¹ Statuta Yayasan Al Kautsar h.3 Tahun 2010

Tahun Pelajaran 1992/1993 penerimaan murid baru berhasil menjanging 40 siswa yaitu 24 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Mengingat Yayasan Al Kautsar bekerjasama dengan SMPN 2 Tanjung Karang untuk menumpang di SMPN 2 Tanajung Karang.

Tanggal 23 Agustus 1992 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus Al Kautsar yang terletak di Jalan Soekarno Hatta (depan Islamic Centre) Oleh Bapak Poedjono Pranyoto Gubernur KDH Tk I Lampung. Unit gedung pertama yang dibangun adalah gedung SMP, dan mulai tahun pelajaran 1993/1994 kegiatan pembelajaran dilakukan di gedung ini.

SMP Al Kautsar didirikan pada tahun 1991, berdasarkan keputusan Kepala kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Lampung Nomor 165/12. BU/1994 pada tanggal 19 Desember 1994, status SMP Al Kautsar “DIAKUP”.

Di tahun 1996 sesuai dengan nomor 659/112. BI/U/1996 berubah status menjadi “DISAMAKAN”. Tahun 2000 dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional nomor 38161/1. 12. A/Kep/2000 akreditasi tetap “DISAMAKAN” dan mulai Desember 2006 status SMP Al Kautsar terakreditasi “A”.²

Saat ini pada usia yang ke 21 tahun SMP Al-Kautsar telah menjadi salah satu sekolah swasta yang unggul di Lampung. Semua itu merupakan buah kerja keras seluruh elemen warga sekolah yang ada di SMP Al-Kautsar, mulai dari OB, karyawan tenaga kependidikan, tenaga pendidik, kepala sekolah hingga pengelola yayasan. Jadi ini merupakan sinergi kerjasama semua warga SMP Al-Kautsar

² Statuta Yayasan Al Kautsar h.6 Tahun 2010

Bandar Lampung.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di SMP Al-Kautsar sebagai berikut ;

- a. Gedung 3 lantai dengan 24 lokal kelas
- b. Ruang Audio Visual
- c. Laboratorium BTE
- d. Laboratorium IPA
- e. Perpustakaan
- f. Studio Musik
- g. Laboratorium Komputer
- h. Laboratorium Bahasa
- i. Internet dengan fasilitas hot spot area
- j. Lapangan olah raga
- k. Poliklinik
- l. Mushola
- m. Audio Visual
- n. Ruang 13 kelas, UKS, Kamtin, dan lain-lain³.

3. Keadaan Siswa

Dalam kegiatan belajar mengajar tentu ada 2 unsur pokok yang harus ada yaitu tenaga pendidik dan siswa. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka proses kegiatan belajar tidak akan berjalan, sebab itu perlu dikemukakan tentang keadaan siswa/i SMP Al Kautsar Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

³ Statuta Yayasan Al Kautsar h.8 Tahun 2010

Keadaan siswa/siswi SMP Al Kautsar Kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 hingga tahun pelajaran 2016/2017 dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

Tabel. 4.1 Jumlah Siswa/siswi SMP Al Kautsar Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015 /2016 2016/2017

Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa			
	Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX	Jumlah
2015/2016	322	307	319	948
2016/2017	296	311	301	908
2017/2018	295	296	309	900

Sumber : Waka Kesiswaan SMP Al Kautsar Tahun pelajaran 2016/2017

Tabel. 4.2 Jumlah pendaftaran dari tahun 2016 -2017

Tahun pelajaran	Pendaftar
2015/2016	650
2016/2017	565
2017/2018	530

Sumber : Waka Kesiswaan SMP Al Kautsar Tahun pelajaran 2016/2017

Dari tabel di atas dapat penulis analisis bahwasanya keadaan siswa/i dari tahun ketahun mengalami peningkatan, ini menunjukkan dari segi input atau penerimaan siswa kinerja tenaga pendidik dilihat masyarakat sangat memuaskan.

4. Keadaan Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik dalam dunia pendidikan adalah orang yang sangat berperan, disamping orang tua tentunya. Oleh karena itu, penulis akan kemukakan tentang kualifikasi tenaga pendidik yang bertugas di SMP Al Kautsar Kota Bandar Lampung.

Data tenaga didik tersebut meliputi nama, jenis kelamin, status kepegawaian mulai dari tenaga pendidik tetap yayasan yang biasa disebut GTY, tenaga pendidik yang diperbantukan atau tenaga pendidik PNS yang ditempatkan

(DPK), ada pula tenaga pendidik honorer dan calon tenaga pendidik tetap yayasan atau CGTY, kemudian pendidikan dan bidang studi yang diajarkan.

Berikut nama-nama tenaga pendidik yang akan dijabarkan dalam tabel 07, data tenaga pendidik SMP Al Kautsar kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.

Tabel. 4.3 Data Tenaga Pendidik SMP Al Kautsar

No	Nama	J K	Stat us	Jabatan	Pendidik an	Bidang Studi
1.	Dra. Hj. Sri Purwaningsih	P	GT Y	Kasek	S1	Bhs Inggris
2.	H. Choirul Saleh, S.S. M.Pd	L	GT Y	Wakasek	S2	Bhs Indonesia
3.	Rudiyanto, S.Pd	L	GT Y	Wakasek	S1	IPS
4.	Dra. Mariana, M.Pd	P	GT Y	Guru / K.Perpus	S2	IPS
5.	Drs. Yudistiro	L	DPK	Guru	S1	IPA
6.	Arismun, S.Pd	L	DPK	Guru	S1	Bhs Inggris
7.	Harsono S.Pd	L	DPK	Guru	S1	IPA
8.	Dra. Hj Septinayati	P	DPK	Guru	S1	PPKn
9.	Hj. Berta Khoiriyati, S.Pd	P	DPK	Guru	S1	Matematika
10	H. Ridjal Effendi S.Ag M.Pd	L	GT Y	Guru	S2	PAI
11	Dra. Hj. Nurwahida	P	GT Y	Guru	S1	Bhs Indonesia
12.	Ir. Hj Rintha Wisangsari	P	GT Y	Guru	S1	IPA
13.	Eni Yulianti, S.Pt	P	GT Y	Guru	S1	Matematika
14.	Hj.SM Zanaria, S.Pd	P	GT Y	Guru	S1	IPS
15.	H. Bunyamin, S.Ag	L	GT Y	Guru	S1	PAI
16.	Nurhayati, S. Ag	P	GT Y	Guru	S1	PAI
17.	Drs. Fadrizal Alams	L	GT Y	PD/BK	S1	BP/BK
18.	Drs. Syamsul Hudiono	L	GT	Guru	S1	IPA/PTD

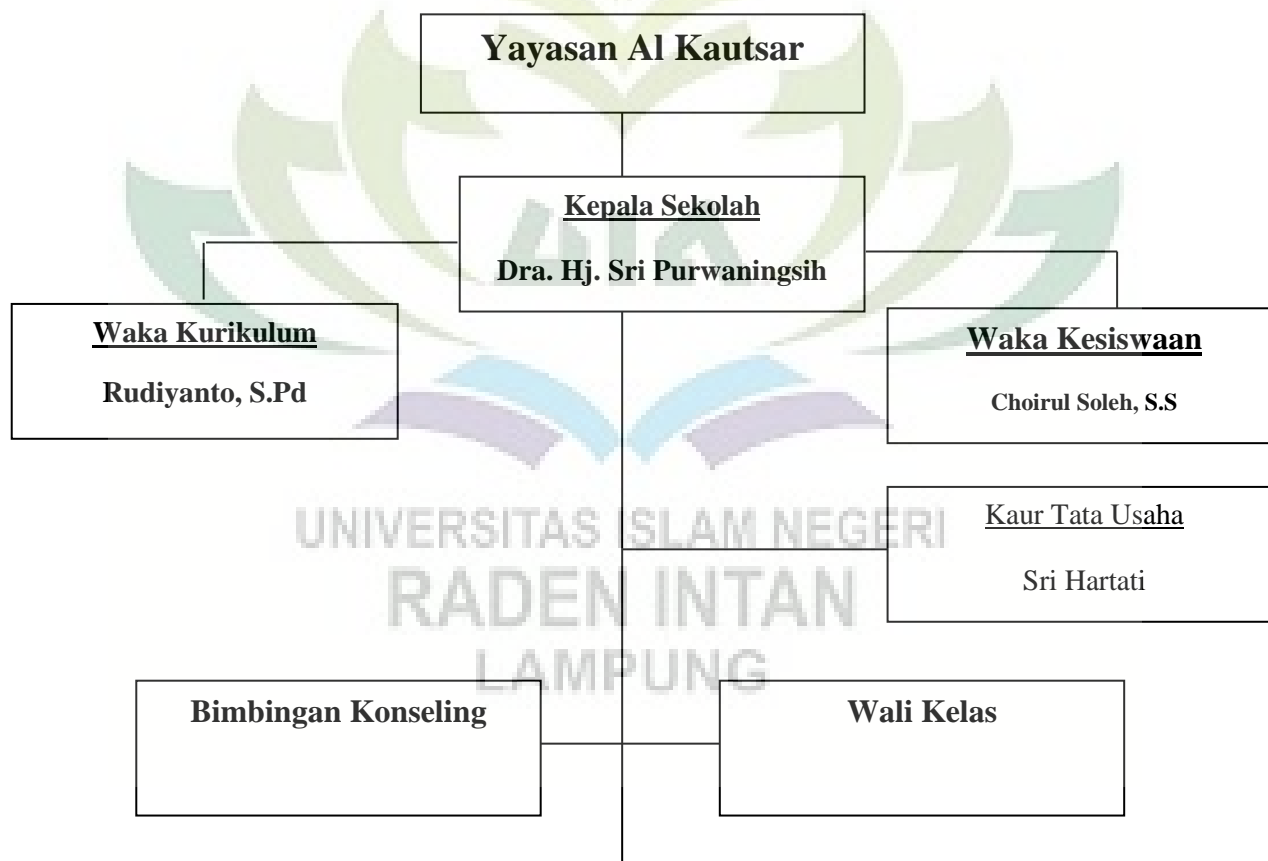
			Y			
19.	Ismawati, S.Pd	P	GT Y	Guru	S1	IPS
20.	Meri Oktarina S.Sos	P	GT Y	Guru	S1	Bhs Indonesia
21.	Agus Sugiarto, S.P	L	GT Y	Guru	S1	IPA
22.	Siti Nurlela, S.Pd	P	GT Y	Guru	S1	Matematika
23.	Eka Pelitawati, S.Pd	P	GT Y	Guru	S1	PPKn
24.	Joko Purwanto, S.Pd	L	GT Y	Guru	S1	Penjaskes
25.	Sumarji, A.Md	L	DPK	Guru	D3	PTD
26.	Ardi Ihwanuddin, S.Sn	L	GT Y	Guru	S1	Seni Budaya
27.	H. Suyadi, S.P	L	GT Y	Guru	S1	PTD
28.	Warsiyem, S.Pd, M.Pd	P	GT Y	Guru	S2	Bhs Lampung
29.	Rosita, S.P	P	GT Y	Guru	S1	IPA/PTD
30.	Alfiah, S.Hum	P	GT Y	PD/BK	S1	Bhs. Inggris
31.	Joko Triyantoro, S. Psi	L	GT Y	Guru	S1	BK
32.	Desy Apriana, S.E, M.Pd	P	GT Y	Guru	S2	IPS
33.	Trainova Belawa, S.Psi	P	GT Y	Guru	S1	BK
34.	Mutia Fauzanti Alfani, S.E	P	HN R	Guru	S1	IPS
35.	Untung Junaidi, S.Pd	L	HN R	Guru	S1	Matematika
36.	Tri Hasriyanti, S.Pd	P	CGT Y	Guru	S1	Bhs. Indonesia
37.	Lela Suri, S.Pd	P	CGT Y	Guru	S1	Bhs. Indonesia
38.	Kismanto, S.Pd	L	CGT Y	Guru	S1	Matematika
39.	Sartono, S.Pd	L	HN R	Guru	S1	Penjaskes
40.	Huzaimah, S.Pd	P	HN R	Guru	S1	Bhs. Inggris
41.	Ade Andriansyah, S.Pd,	L	HN	Guru	S2	Bhs. Inggris

	M.Pd		R			
42.	Dedi Gussanto, S.E	L	GT Y	Guru	S1	TIK

Sumber : Waka Kurikulum SMP Al Kautsar Bandar Lampung

Apabila dilihat dari komposisi guru yang mengajar di SMP Al Kautsar, maka dapat penulis analisis bahwasanya secara kualifikasi akademik guru-guru di SMP ini sudah memenuhi syarat, walaupun masih ada satu orang yang berjenjang D3.

5. Bagan 4.1 Struktur Organisasi Sekolah



6. Data Orang a. Penghasila

Guru Mata Pelajaran

Penghasilan Orang Tua

Penghasilan	L	P	Total
-------------	---	---	-------

≤ Rp. 500.000	73	192	265
Rp. 500.000 – Rp. 999.999	10	65	75
Rp. 1.000.000 – Rp. 1.999.999	105	195	300
Rp. 2.000.000 – Rp. 4.999.999	195	255	450
Rp. 5.000.000 – Rp. 20.000.000	80	275	355
≥ Rp. 20.000.000	0	0	0
Total	463	982	1445

(Sumber: Laporan Sekolah, Tahun 2017)

Dapat dilihat dari data di atas bahwa penghasilan orang tua siswa SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada posisi atas berpenghasilan menengah ke atas yaitu Rp.2.000.000 – Rp. 4.999.999 per bulan dengan jumlah 450 orang, posisi kedua berpenghasilan Rp. 5.000.000 – Rp. 20.000.000 per bulan dengan jumlah 355 orang, posisi ketiga berpenghasilan ≤ Rp. 1.000.000-Rp.1.999.999 per bulan dengan jumlah 300 orang, dan posisi keempat <Rp. 500.000 per bulan dengan jumlah 265 orang.

b. Jenjang Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Orang Tua

Tabel 4.5
Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua

Jenjang Pendidikan	Total	Jenis Pekerjaan	Total
SMA/Sederajat	595	Karyawan Swasta	650
Diploma 1	95	PNS/TNI/Polri	265
Diploma 2	122	Wiraswasta	340
Diploma 3	175	Wirausaha	95
Strata 1	340	Buruh	59
Strata 2	94	Lainnya	44
Strata 3	24		
Total	1445	Total	1445

(Sumber: Laporan Sekolah, Tahun 2017)

Dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir orang tua siswa SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang paling tinggi tingkat pendidikan terakhir yaitu, SMA/Sederajat berjumlah 595 orang, Strata 1 (S1) berjumlah 30 orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 175 orang, Diploma 2 (D2) berjumlah 122 orang, Diploma 1 (D1) berjumlah 95 orang, Strata 2 (S2) berjumlah 94 orang, dan Strata 3 (S3) berjumlah 24 orang. Sedangkan pekerjaan orang tua siswa SMP Al-Kautsar Bandar Lampung paling banyak sebagai karyawan swasta dengan jumlah 650 orang, wiraswasta 340 orang, PNS/TNI/Polri berjumlah 265 orang, wirausaha berjumlah 95 orang, dan buruh berjumlah 59 orang.

B. Deskripsi Data

1. Program Sekolah

Program kegiatan sekolah yang terdapat di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun ajaran 2016/2017 berjumlah 15 kegiatan yang terdiri dari:

Masa orientasi siswa merupakan kegiatan masa pengenalan siswa baru terhadap lingkungan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, dan mengetahui karakter siswa lebih mendalam kaitannya dengan pembagian kelas. Jumlah siswa kelas 1 sebanyak 162 orang. *Masa orientasi seluruh siswa* merupakan kegiatan dalam rangka menjalankan visi dan misi SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 530 siswa dan anggaran dana tersebut berasal dari uang kegiatan tahunan.

Ramadhan camp (pesantren kilat) merupakan kegiatan yang bertujuan

untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT melalui penanaman nilai-nilai kemuliaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadhan. Kegiatan pesantren ramadhan tersebut diikuti oleh kelas 1, 2, dan 3 dengan jumlah siswa 950 siswa. Anggaran dana kegiatan tersebut berasal dari uang kegiatan tahunan. *Buka puasa bersama* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi. Kegiatan tersebut melibatkan guru, karyawan, dan Yayasan sekolah. Anggaran dana kegiatan berasal dari uang kegiatan tahunan.

Halal Bi Halal merupakan kegiatan silaturahmi yang dilakukan oleh seluruh warga SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, setelah Idul Fitri dan memasuki hari pertama sekolah. *Kegiatan HUT RI 2017*, merupakan perayaan hari kemerdekaan Indonesia. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung melakukan perayaan tersebut dengan mengadakan lomba. Kegiatan tersebut melibatkan siswa kelas 1-3 dengan jumlah 255 orang. *Assembly* merupakan wadah penyaluran kreatifitas dan bakat siswa dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Kegiatan tersebut diikuti oleh kelas 1-2 dengan jumlah siswa sebanyak 225 orang.

Peringatan sumpah pemuda merupakan kegiatan lomba yang dilakukan oleh seluruh kelas 1-3. *HKSN* merupakan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, siswa kelas 1-3 mengikuti acara tersebut dengan berbagi kepada sesama di lingkungan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung.

Class meeting merupakan wadah untuk memberikan pengalaman terhadap siswa tentang cara bagaimana bekerjasama dalam kelompok, kerja keras, menghargai kemenangan dan belajar dari setiap kekalahan. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung mengadakan kegiatan lomba pada setiap akhir semester genap.

Peserta lomba terdiri dari kelas 1-3 dengan Perkiraan jumlah Peserta 950 orang.

Mini farming merupakan kegiatan mengenal lingkungan yang diajarkan kepada seluruh siswa di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, tujuan kegiatan tersebut adalah siswa diharapkan mampu menanam tumbuhan dan memelihara lingkungan. *Science fair* merupakan kegiatan lomba yang diikuti oleh siswa SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. *Perjusa (Perkemahan Jumat Sabtu)* merupakan kegiatan kepramukaan siswa yang bertujuan untuk memperdalam rasa memiliki dan cinta terhadap sekolah dan gugus depan, menjalankan SK KWARNAS No. 107 tahun 1999, melatih kemandirian siswa, dan melatih sikap kerja sama yang baik. Kegiatan tersebut diikuti oleh kelas 2 dan 3 dengan jumlah siswa 259 orang.

Pekan maulid nabi Muhammad SAW merupakan kegiatan dalam rangka mengenang kelahiran nabi Muhammad. Tujuan kegiatan tersebut adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak rasulullah, dan mengetahui sejarah kehidupan nabi Muhammad. Dana kegiatan tersebut berasal dari uang kegiatan tahunan. Seluruh siswa kelas 1-3 terlibat dalam kegiatan tersebut dengan jumlah 295 orang. *Foto kelas* merupakan kegiatan yang diadakan setiap satu tahun sekali untuk mengabadikan kebersamaan siswa-siswi beserta guru dan pengambilan pas foto untuk kelengkapan administrasi siswa kelas 1-3. Jumlah siswa kelas 1-3 adalah 295 orang. Anggaran dana kegiatan tersebut berasal dari uang kegiatan tahunan.

Program/kegiatan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Akademik, terdiri dari kegiatan MOS Grade I dan All Grade,

Peringatan Sumpah Pemuda, Perjusa (Perkemahan jumat-sabtu), Peran profesi, *mini farming*.

- b. Sosial keagamaan, terdiri dari kegiatan *Ramadhan Camp*, Buka puasa bersama, Halal Bi Halal, Pemotongan hewan qurban, HKSN (Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional), dan Maulid Nabi.
- c. Olahraga, kesenian, dan hobi, terdiri dari kegiatan Lomba peringatan HUT RI, *Assembly*, *Class meeting*, Foto kelas.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6

Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	MOS (Masa Orientasi Siswa) Grade 1	25-26 Juni 2017
2.	MOS All Grade	14 Juli 2017
3.	Ramadhan Camp	28-30 Mei 2017
4.	Buka Puasa Bersama	19 Juni 2017
5.	Halal Bihalal	30 Juni 2017
6.	HUT RI	18 Agustus 2017
7.	Assembly	22 - 26 September 2017
8.	Pemotongan Hewan Qurban	02 September 2017
9.	Peringatan Sumpah Pemuda:	28-31 Oktober 2017
10.	HKSN	10 November 2017
11.	<i>Class meeting</i>	-
12.	<i>Mini Farming</i>	02-06 Februari 2015
13.	Perjusa (Perkemahan Jumat Sabtu)	29 Februari 2017
14.	Maulid Nabi	-
15.	Foto Kelas	11-12 Maret 2017

(Sumber: Program Kegiatan tahun 2016-2017 SMP Al-Kautsar Bandar Lampung)

2. Penerimaan Dana

a. RKAS Penerimaan Dana

Tabel 4.7

RKAS Penerimaan Dana

No. Urut	No. Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3	4
I	1	Sisa tahun lalu	47.005.000,00
II	2	Pendapatan Rutin	
	2.1	SPP Siswa	1.778.640.000,00
	2.2	POMG	77.400.000,00
	2.3	UKT	360.250.000,00
III	3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
	3.1	BOS Pusat	178.310.000,00
	3.2	BOS Provinsi	6.475.000,00
	3.3	BOS Kabupaten/Kota	28.500.000,00
IV	4	Sumber Pendapatan Lainnya	
	4.1	Uang Pangkal	740.000.000,00
	4.2	Formulir dan Observasi	15.000.000,00
	4.3	Sumbangan Alumni	
	4.4	Pendapatan Asli Sekolah	890.280.000,00
Jumlah Penerimaan			4.121.860.000,00

(Sumber: RKAS TA 2016/2017 SMP Al-Kautsar Bandar Lampung)

Penerimaan dana SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun ajaran 2016/2017 terdiri dari 4 (empat) sumber dana, yaitu (a) Dana sisa tahun ajaran 2015/2016, berjumlah Rp. 47.005.000, (b) Pendapatan rutin yang terdiri dari: SPP Siswa, dibayarkan perbulan sebesar Rp. 600.000 per siswa, atau disebut dana komite, dibayarkan perbulan sebesar Rp. 25.000 per siswa, dan UKT (Uang

Kegiatan Tahunan), dibayarkan satu kali setiap tahun ajaran baru. Kisaran biaya Rp 1.000.000 – Rp 1.200.000 per siswa. (c) Bantuan Operasional Sekolah yang terdiri dari: BOS Pusat, besaran dana yang diterima Rp. 580.000 per tahun per siswa, BOS Provinsi, besaran dana yang diterima Rp. 25.000 per tahun per siswa, dan BOS Kabupaten/Kota, besaran dana yang diterima Rp. 10.000 per bulan per siswa. (d) Sumber pendapatan lainnya yang terdiri dari: Uang pangkal, yaitu uang bangunan yang dibayar siswa pada awal tahun masuk sekolah sebesar Rp. 10.000.000 – Rp. 11.000.000, formulir dan observasi, sebesar Rp. 250.000 per siswa, Pendapatan asli sekolah, yaitu usaha sekolah berupa jemputan siswa, *catering*, penjualan buku dan seragam. Seragam siswa laki-laki dan perempuan berjumlah 5 (lima) stel.

3. Pengeluaran Dana/Belanja

a. RKAS (Pengeluaran dana/belanja)

Tabel 4.8

RKAS Pengeluaran Dana

No. Urut	No. Kode	Uraian	Jumlah
5	6	7	8
I	1	Program Sekolah	
	1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	15.840.000,00
	1.2	Pengembangan Standar Isi	19.000.000,00
	1.3	Pengembangan Standar Proses	401.438.000,00
	1.4	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.500.000,00
	1.5	Pengembangan Sarana dan Prasarana	68.070.000,00

	1.6	Pengembangan Standar Pengelolaan	24.524.000,00
	1.7	Pengembangan Standar Biaya	141.727.000,00
	1.8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	21.312.000,00
II	2	Belanja Lainnya	
	2.1	Belanja Pegawai	1.520.000.000,00
	2.2	Belanja Barang dan Jasa	944.550.000,00
	2.3	Belanja Modal	617.550.000,00
Jumlah Pengeluaran			378.851.100,00
III	3	Saldo Akhir Tahun Ajaran	333.349.000,00
Jumlah			4.121.860.000,00

(Sumber: RKAS TA 2016/2017 SMP Al-Kautsar Bandar Lampung)

Pengeluaran dana SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun ajaran 2016/2017 terdiri dari 2 kelompok pengeluaran, yaitu program sekolah (pengembangan kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengembangan standar pengelolaan, standar biaya, serta pengembangan dan implementasi sistem penilaian) dan belanja (pegawai, barang dan jasa, serta modal).

Program pengembangan kompetensi lulusan terdiri dari sub program pencapaian akademis peserta didik, yaitu pelaksanaan uji coba UASBN/UN tingkat kecamatan dan kota, ujian sekolah dan ujian nasional dengan rencana pengeluaran sebesar Rp. 15.840.000. Program pengembangan standar isi terdiri dari sub program relevansi dan kesesuaian kurikulum, yaitu penyusunan program tahunan dan semester dengan rencana pengeluaran sebesar Rp. 19.000.000.

Program pengembangan standar proses terdiri dari sub program rencana

pelaksanaan pembelajaran efektif, yaitu konsultasi pendidikan (psikolog), *workshop* peningkatan kompetensi semua guru, pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB), lomba, ekstrakurikuler, peringatan hari besar agama dan nasional, *assembly*, ramadhan, halal bi halal, *mini farming*, *science fair*, HKS, foto kelas, *ramadhan camp*, perjusa, dokter kecil, kepramukaan, doa bersama, motivasi *training*, dan perpisahan. Sub program penyediaan sumber belajar terdiri dari pengadaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, alat pembelajaran, media pembelajaran, dan buku perpustakaan. Sub program penggunaan sumber belajar secara tepat terdiri dari pemberdayaan perpustakaan (bulan bahasa). Rencana pengeluaran program pengembangan standar proses sebesar Rp. 401.438.000.

Program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari 2 sub program, yaitu sub program kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan (peningkatan kualitas guru kelas, matapelajaran, dan kompetensi kepala sekolah), dan sub program peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (*workshop* tenaga pendidik dan kependidikan dan penyelenggaraan kursus bahasa Inggris guru) dengan rencana pengeluaran sebesar Rp. 14.500.000.

Program pengembangan sarana dan prasarana sekolah terdiri dari 2 sub program, yaitu sub program kecukupan sarana sekolah (pengadaan printer dan adaptor *keyboard*, meja dan kursi kelas, *handy talky*, karet tangga, AC, TV, gas pemadam kebakaran, karpet kelas, *amplifier*, *mic wairless*, grinda duduk, spiker, kaca film, dan pembuatan tempat wudhu) dan sub program pemeliharaan sekolah (ruang kelas, pengecatan gedung, dan pemeliharaan tanaman) dengan rencana

pengeluaran sebesar Rp. 68.070.000.

Program pengembangan standar pengelolaan terdiri dari 3 sub program, yaitu sub program pengelolaan berbasis kerja tim dan kemitraan (pelaksanaan rapat kerja kepala sekolah, dan lokakarya kepala sekolah), sub program pengumpulan dan penggunaan data sekolah (*workshop* dapodik, *updating* data kesiswaan, guru dan karyawan, penyusunan laporan, dan sub program peran serta masyarakat) rapat koordinator komite sekolah, sosialisasi kebijakan (*class meeting*) dengan rencana pengeluaran sebesar Rp. 24.524.000.

Program pengembangan standar pembiayaan terdiri dari sub program pengelolaan keuangan, yaitu snack guru dan karyawan, operasional *pettycash*, pembayaran rekening listrik, telepon, internet, dan pengadaan kebersihan dengan rencana pengeluaran sebesar Rp. 141.727.000. Program pengembangan dan implementasi sistem penilaian terdiri dari sub program ketersediaan penilaian bidang akademik dan non akademik, yaitu sertifikat, UAS dan kediknasan, raport, dan ijazah dengan rencana pengeluaran sebesar Rp. 21.312.000.

Sub program belanja lainnya terdiri dari gaji guru dan karyawan, kegiatan komite, kegiatan guru dan karyawan, jemputan, *catering*, seragam, promosi, buku, *leasing* mobil, pembangunan kantin sekolah, renovasi lantai 3 dan 4 dengan rencana pengeluaran sebesar Rp. 3.082.100.000.

b. Rencana Pengeluaran Dana/Belanja

Rencana pengeluaran dana SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun ajaran 2016/2017 terdapat 82 (delapan puluh enam) jenis pengeluaran anggaran. 11 anggaran terbesar terdapat pada post pengeluaran (a) gaji guru dan karyawan,

(b) renovasi lantai 3 dan lantai 4, (c) kegiatan guru dan karyawan, (d) pembayaran rekening listrik, telepon, dan internet, (e) ekstrakurikuler, (f) sarana KBM, (g) perpisahan, (h) snack guru dan karyawan, (i) program semester, (j) pengadaan media pembelajaran, dan (k) operasional.

Rencana pengeluaran gaji guru dan karyawan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada TA 2016/2017 membutuhkan dana sebesar Rp. 1.520.000.000. Rencana pengeluaran dana renovasi lantai 3 untuk ruang kelas dan lantai 4 untuk sarana olah raga. Pembangunan renovasi lantai 3 dan lantai 4 masih berjalan sampai sekarang. Untuk melihat gambar renovasi lantai 3 dan lantai 4 terdapat di lampiran no. 9. Dana yang dikeluarkan untuk renovasi pada TA 2016/2017 sebesar Rp. 400.000.000.

Kegiatan guru dan karyawan berupa *workshop* yang diselenggarakan di sekolah setiap 2 bulan sekali, *afternoon tea*, buka puasa bersama, *family gathering*, media ajar guru. Pada TA 2016/2017 rencana pengeluaran tersebut membutuhkan dana sebesar Rp. 148.150.000. Biaya pembayaran rekening listrik, telepon, dan internet pada TA 2016/2017 sebesar Rp. 96.000.000. Setiap ruangan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung AC (*Air Conditioner*) tiap bulan membayar tagihan sebesar Rp. 7.500.000 - Rp. 8.500.000.

Pelaksanaan ekstrakurikuler pada TA 2016/2017 membutuhkan dana sebesar Rp. 82.650.000. Penggunaan dana ekstrakurikuler dikeluarkan untuk pendaftaran, membayar jasa pelatih, tempat renang, serta pembelian bahan dan alat yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Pengeluaran dana operasional

sebesar Rp. 65.087.000. Penggunaan dana tersebut dikeluarkan untuk transport guru dan karyawan, pembelian bensin, biaya PSB (Penerimaan Siswa Baru), dan promosi.

Rencana pengeluaran dana *Unit Activity* (UA) pada TA 2016/2017 sebesar Rp. 31.400.000, Kegiatan UA bertujuan untuk memberikan sarana kepada siswa untuk mengasah bakat dan kemampuannya. UA merupakan kegiatan tahunan yang terdiri dari kegiatan menari, *flannel*, meronce, *clay*, kreasi daur ulang, *theater*, futsal, *kokoru*, menari, komputer, pianika, *story telling*, angklung, vocal, catur, *tahfidzh*, pramuka, mading, melukis, dan *scrab book*.

Pengadaan sarana penunjang KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), yaitu potokopi LKS (Lembar Kerja Siswa) dalam 1 bulan menghabiskan dana Rp. 1.000.000– Rp. 2.000.000.

Pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) dalam 1 bulan rata-rata menghabiskan dana Rp. 1.000.000. Dana pengadaan sarana penunjang KBM TA 2016/2017 sebesar Rp. 29.000.000.

Rencana pengeluaran dana untuk snack guru dan karyawan, setiap hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari jum'at. Membutuhkan dana pada TA 2016/2017 sebesar Rp. 25.440.000. Pengeluaran dana untuk 42 orang guru dan karyawan sebesar Rp. 2.000 per hari atau sebulannya lebih dari Rp.2.000.000. Perpindahan merupakan kegiatan siswa kelas III (Tiga), dana yang digunakan dari dana UKT, pada TA 2016/2017 dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 21.600.000.

Rencana pengeluaran dana untuk penyusunan program semester sebesar Rp.

13.000.000. Penyusunan program tersebut dilaksanakan pada rapat kerja di luar sekolah pada setiap semester dengan menggunakan dana sekolah dan BOS. Rencana pengeluaran dana pengadaan media pembelajaran dilakukan perencanaan pada awal tahun ajaran, pada anggaran TA 2016/2017 membutuhkan dana Rp. 12.000.000. Rencana pengeluaran biaya operasional sebesar Rp. 65.087.000.

c. Realisasi Pengeluaran Dana Tahun Ajaran 2016/2017

Realisasi pengeluaran dana TA 2016/2017 pada post pengeluaran 15 terbesar, yaitu: (a) gaji guru dan karyawan sebesar Rp. 1.316.320.000 (b) Pengeluaran anggaran renovasi sebesar Rp. 400.000.000. (c) Pengeluaran kegiatan guru dan karyawan sebesar Rp. 130.789.000 (d) Pembayaran rekening listrik, telepon, internet Rp. 95.500.000. (e) Ekstrakurikuler sebesar Rp. 82.560.000. (f) Sarana KBM menghabiskan dana Rp. 26.000.000. (g) Perpindahan menghabiskan dana Rp. 19.567.000. (h) Snack guru dan karyawan menghabiskan dana sebesar Rp. 36.000.000. (i) Kegiatan program semester menghabiskan dana Rp. 16.000.000. (j) Pengadaan media pembelajaran menghabiskan dana Rp. 13.500.000. (k) Operasional menghabiskan dana Rp. 70.500.000.

Realisasi pengeluaran dana/belanja SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun ajaran 2016/2017 lebih besar 20-30% dari realisasi pengeluaran dana/belanja dalam 3 tahun terakhir.

4. Kurikulum Plus

Kurikulum Plus yang ada di SMP Al Kautsar terdiri dari berbagai macam program yaitu sebagai berikut ;

a. Program BTE (*Basic Technology Education*).

BTE merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia (Direktur Sekolah Swasta) dengan *National Institute For Curriculum Development The Nether-Lands* sebagai proyek perintisan. Tahun 1997 pemerintah Indonesia menunjuk empat sekolah swasta seluruh Indonesia, salah satunya adalah SMP Al Kautsar. Untuk lebih jelas lihat tabel 4.5.

Tabel. 4.9 Kurikulum BTE

Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sketsa teknik ▪ Dasar-dasar teknik ▪ Pengenalan kayu ▪ Pengenalan logam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prinsip-prinsip teknik ▪ Transportasi dan pengenalan lingkungan ▪ Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelistrikan ▪ Teknologi kontrol ▪ Wiraswasta dan profesi

Sumber : Waka Kurikulum SMP Al Kautsar

- b. Kegiatan keagamaan yaitu ROHIS, MTQ, Dai Kecil, Kaligrafi dan Nasyid
- c. Kegiatan Olah raga yaitu karate, sepak bola, basket, bulu tangkis, voli, kriket, dan lain-lain
- d. Kegiatan seni yaitu seni musik, seni tari, seni suara dan kerajinan tangan
- e. Drumband, PMR, Pramuka, KIR dan Wirausaha
- f. Wisata Ilmiah
- g. Kegiatan Sabtu Ceria

h. English Club dan Sains Club

5. Metode pembelajaran yang diterapkan di SMP Al Kautsar yaitu

sebagai berikut ;

- a. Melalui modul yang dibuat oleh tim MGMPS
- b. Melalui multi media yaitu VCD, DVD, IHP, LCD, TV, komputer dan lain-lain
- c. Penerapan secara langsung melalui bimbingan
- d. Outdoor study
- e. Prestasi SMP Al Kautsar

Tabel. 4.10 Prestasi Siswa SMP Al Kautsar

No	Waktu	Nama Siswa	Prestasi	Pelaksana	Tingkat	Guru Pembimbing
01	22/01/15	Masdar Habibi 8C	Juara I TQ	MTs. Miftahul Jannah	Kota B.Lampung	Drs. Makmun Rasyid
		Latif Nur Jamil	Juara II TQ			
		Nur Azizah Gozali	Juara III TQ			
02	03/02/15	Tania Indah Kusuma	Juara I Pidato B. Inggris & Lampung (PI)	Racana Unila	Provinsi Lampung	Warsiyem, M.Pd
		Rifatabhi Rama	Juara I Pidato B. Inggris & Lampung (PA)			Kismanto, S. Pd
03	04/02/15	Kresna Bayu	Juara III Bloger	SMAN 2 BL		Sudaryanto, Dkk
04	11-13/02/15	Triska W Dkk	Juara I LCT MIPA	STKIP Pringsewu		Harsono, S.Pd
		Wiya Dkk	Juara III LCT MIPA			Kismanto, S.Pd
05	25/02/15	Adinda Dkk	Juara I Olimpiade Kimia	Unila	Rosita, S.Pd	
			Juara II Olimpiade Biologi			
			Juara III Olimpiade Biologi		Harsono, S.Pd	

06	22/02/15	Tim Putri Pramuka	Juara Harapan III Pionering	IAIN Raden Inten	Kota Bandar Lampung	Kismanto, S.Pd
07	23/02/15	Adinda Dkk	Juara II Pra Olimpiade Biologi	MGMP IPA Kota Bandar Lampung		Harsono, S.Pd
08	17/04/16	Azizah Naufal dkk	Juara LCT PAI	Depag Kota Bandar Lampung		Provinsi Lampung
09	09/05/16	Masdar Habibie 8C Masdar Habibie 8C	Juara I MTQ	Depag Lampung Tengah		
10	07/06/16		Juara 1 MTQ	Depag Prov Lampung		
11	22/10/16					
12	04/11/16	Fathia 8A	Juara 1 Komp Sains Biologi	MKKS Kota B. Lampung	Kota Bandar Lampung	Rosita, S.Pd
		Nisrina Luthfia	Juara Harapan 2 Kompetisi sains Biologi			Harsono, S.Pd
13	04/11/16	Nisrina Lutfia	Juara 1 Lomba menulis Puisi	Polda Lampung		Ir. Rintha W
14	05/11/16	Adam 9C	Juara 1	PTW Taekwondo Lampung	Provinsi Lampung	Patoni Latif H. Joko Purwanto, S.Pd
		Farhan 8 C	Tekwondo Kelas HEAPI			
		Novandi 8A	Juara 1			
		Ana 8B	Taekwondo Kelas Midle			
		Nanang 8B M. Abror 9 G				
15	06/11/16	M. Bilal 9H	Juara III Roket Air	PT IPTEK JAKARTA		Drs. Fadrizal Alams
16	16/11/16	Fatahia Fitria 8A	Juara I Pidato Bahasa Inggris	MAN 2 Tanjung Karang	Provinsi Lampung	Arismun, S.Pd
		ffa 8A				

Sumber : Waka Kesiswaan SMP AL Kautsar

C. Temuan Hasil Penelitian

Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti setelah kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung membuat laporan keuangan untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan yaitu yayasan, orang tua, dan pemerintah. Sedangkan monitoring terhadap hasil evaluasi anggaran dilakukan oleh pihak yayasan dan manajemen yang dilakukan setiap bulan dan penggunaan dana BOS disampaikan setiap triwulan untuk dana BOS Pusat dan BOS Kabupaten/Kota, serta dana BOS Provinsi dilaporkan per semester.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Hartoni, bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS, sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat, yang dalam hal ini kaitannya dengan komite sekolah dan wali murid. Partisipasi masyarakat berupa dukungan yang diberikan oleh Yayasan, wali murid, dan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah yang telah direncanakan dan tercantum dalam program RKAS. Hal tersebut memiliki kesamaan yang dilakukan oleh SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, bahwa sekolah memberikan kesempatan kepada guru, karyawan, dan komite sekolah untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan/program sekolah.

Partisipasi guru dan karyawan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, yaitu dengan membuat daftar usulan kebutuhan yang akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan RKAS untuk satu tahun ajaran,

sedangkan komite sekolah berpartisipasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan siswa, dengan membantu dari segi materi berupa uang orang tua. Dengan menyumbangkan makanan kepada para siswa dalam setiap kegiatan dan membantu kekurangan anggaran kegiatan sekolah. Sedangkan hasil penelitian Rediana mengemukakan bahwa keterlibatan guru dalam pembuatan RAPBS/APBS di sekolah negeri dilakukan pada saat rapat komite dan pelaksanaan program disesuaikan dengan anggaran yang telah disahkan. Namun di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, komite sekolah tidak dilibatkan dalam pembuatan RKAS, hanya Tim Manajemen yang membuat RKAS pada saat rapat internal Tim Manajemen.

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang merupakan sekolah swasta telah melakukan pembukuan keuangan dengan baik. Sumber penerimaan dana SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang berasal dari orang tua dan dana BOS di buat laporan keuangannya secara terperinci. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung membuat laporan bulanan, tahunan, dan laporan pertanggungjawaban dana BOS kepada yayasan dan pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sekolah. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giyanto, bahwa sekolah dikatakan transparan jika pelaporan dilakukan secara intern dan ekstern mulai dari laporan triwulan, semester, dan tahunan.

2. Penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan keuangan sekolah di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, telah menggunakan standar

operasional prosedur. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung menggunakan penyusunan anggaran pendidikan dengan pendekatan PPBS (*Planning Programming Budgeting System*). PPBS merupakan perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan program/kegiatan dari masing-masing unit di sekolah. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung menggunakan pendekatan PPBS, yaitu dengan adanya rapat kerja yang dilakukan sekolah setiap awal tahun ajaran untuk membahas program/kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Keterbukaan dalam perencanaan keuangan dilakukan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, yaitu dengan membuat RKAS (rencana kegiatan anggaran sekolah) pada tahun ajaran baru. Proses pembuatan RKAS menggunakan sistem *bottom up*, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan karyawan) dan disetujui oleh atasan yaitu kepala sekolah, direktur pendidikan, dan kepala keuangan. Dalam perencanaan anggaran sekolah pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, karyawan, yang membuat rencana anggaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah serta 8 standar pendidikan nasional.

3. Penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan keuangan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung diterapkan dengan adanya keterlibatan guru, karyawan, dan komite sekolah dalam membuat anggaran kegiatan dan laporan pertanggungjawaban serta adanya bukti fisik (struk pembelanjaan barang/jasa). Dalam mengajukan anggaran, setiap pelaksana kegiatan (guru dan karyawan) harus membuat proposal kegiatan dan mengisi

lembar permintaan dana kegiatan, barang/jasa (bukti transaksi sementara). Lembar permintaan dana harus diotorisasi oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kepala Keuangan. Para penanggung jawab kegiatan harus membuat proposal kegiatan, beserta dana yang dibutuhkan pada bukti transaksi sementara. Proposal dan bukti transaksi sementara diajukan kepada Kepala Keuangan sekaligus Bendahara sekolah setelah dana keluar pihak atasan melakukan pengawasan dalam terlaksananya kegiatan sesuai tujuan, dan setelah kegiatan terlaksana para penanggung jawab harus membuat laporan pertanggungjawaban dalam kurun waktu 1 minggu.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana sekolah baik dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sumber dana yang didapatkan oleh SMP Al-Kautsar Bandar Lampung terdiri dari pendapatan rutin dan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sumber dana tersebut digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program/kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sekolah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas harus mencapai tujuan dan

sasaran yang ditetapkan serta berorientasi terhadap pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dalam menentukan sasaran yang ditetapkan dijelaskan oleh Kepala Keuangan bahwa pihak sekolah melakukan analisis SWOT dan analisis pendidikan saat ini dan satu tahun ke depan. Hal tersebut dilakukan sekolah untuk menentukan skala prioritas program/kegiatan sehingga perencanaan sesuai dengan hasil pelaksanaan dan sebagai bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilakukan dalam rapat bersama kepala sekolah, guru, dan bagian keuangan. Hasil evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk analisis kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan program/kegiatan yang akan datang sehingga program/kegiatan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam teori sebelumnya dipaparkan bahwa tujuan akuntabilitas adalah dapat menentukan tujuan yang tepat. Hal yang dimaksud dengan tujuan yang tepat di sini adalah memanfaatkan pengelolaan dana seefektif mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan atas tujuan dari program tersebut. Di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dalam menentukan anggaran disesuaikan dengan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut diungkap oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan bahwa penggunaan anggaran sekolah sesuai dengan rencana (RKAS) yang telah dibuat sebelumnya.⁸⁴

Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dibuat sesuai dengan visi, dan misi sekolah yang ada. Terkait dengan pembuatan anggaran yang disesuaikan

⁸⁴Hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan pada hari senin 9 September 2017

dengan visi, misi sekolah Ibu Sri Purwaningsih selaku kepala sekolah mengatakan bahwa:

“... misi mengembangkan kecerdasan spiritual, maka adanya anggaran untuk meningkatkan kualitas baca al-quran siswa, anggaran pelatihan al-quran untuk guru. Dan menciptakan siswa berwawasan internasional, dengan adanya anggaran untuk pembelajaran bahasa Inggris, pelatihan, penggunaan buku, dan media yang mendukung.”⁸⁵

Senada dengan pendapat Bapak Rudianto, S.Pd selaku Wakil kepala sekolah bidang kurikulum terkait dengan pembuatan anggaran yang disesuaikan dengan visi, misi sekolah. Beliau mengatakan:

“... contohnya, membentuk akhlak yang baik, anggaran yang dikeluarkan harus mendukung sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan media belajarnya”.⁸⁶

Pembuatan anggaran yang disesuaikan dengan visi, misi sekolah yang dilakukan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dijelaskan pula oleh Bapak H. Chairul saleh, S.S. M.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, beliau mengatakan bahwa:

“..., setiap kegiatan mengacu pada visi, misi sekolah. Contohnya saja, visi cerdas dan berakhlak mulia, maka dari itu dibuatlah kegiatan keagamaan seperti maulid nabi, ramadhan camp.”⁸⁷

Dari pemaparan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dapat disimpulkan bahwa SMP Al-Kautsar Bandar Lampung membuat rencana kegiatan berdasarkan visi dan misi yang telah dibuat oleh sekolah SMP Al-Kautsar Bandar

⁸⁵ Hasil wawancara dengan kepala sekolah pada hari senin 9 September 2017

⁸⁶ Hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum pada hari senin 9 September 2017

⁸⁷ Hasil wawancara dengan H. Chairul saleh, S.S. M.Pd selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan pada hari senin 9 September 2017

Lampung telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap program kegiatan sekolah yang dilaksanakan, selalu mengarah kepada visi dan misi sekolah. Sehingga setiap program yang dilaksanakan, memiliki manfaat untuk siswa dan anggaran yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien.

Dokumentasi dan informasi dalam pengelolaan anggaran di sekolah sudah diterapkan oleh SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, yaitu dengan adanya pembuatan RKAS dalam perencanaan anggaran sekolah, pembuatan proposal anggaran kegiatan, laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disertai dengan bukti fisik. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung memiliki standar pengelolaan keuangan sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan, sesuai dengan penuturan Direktur Pendidikan bahwa sekolah membuat anggaran sesuai dengan 8 standar pendidikan, yaitu standar isi, sarana prasarana, pengelolaan, kompetensi lulusan, proses, PTK, pembiayaan, penilaian pendidikan.⁸⁸

Sasaran kebijakan dalam pengelolaan keuangan di sekolah sangat penting, yaitu untuk menetapkan tujuan dan hal yang paling penting untuk dilaksanakan. Setelah penetapan sasaran kebijakan tercapai, maka sekolah harus menilai kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tolak ukur dalam menilai sasaran kebijakan anggaran di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, yaitu dengan melihat anggaran yang direncanakan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala SMP Al-Kautsar Bandar

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri purwaningsih sebagai Kepala Sekolah SMP AL-Kautsar Bandar Lampung. Pada, 28 September 2017.

Lampung.

Prinsip akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh para pemangku kepentingan. Segala kebijakan dan informasi dalam kebijakan pengelolaan keuangan sekolah, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung melakukan penyebaran informasi tersebut melalui rapat internal, baik yang dilakukan dengan yayasan, guru, dan karyawan, rapat komite dan penyebaran informasi melalui surat yang diberikan kepada orang tua siswa.

Dari hasil informasi mengenai kebijakan pengelolaan keuangan di sekolah, tentunya ada saja hal yang menjadi keluhan atau permasalahan yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan, sekolah harus dapat menampung dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung mekanisme pengaduan masyarakat dilakukan dengan cara disampaikan ke Kepala Sekolah melalui rapat. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, bahwa adanya pengaduan dari guru ataupun orang tua siswa disampaikan dan diselesaikan dalam rapat serta mencari solusi.⁸⁹

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung sudah cukup baik, yaitu dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai informasi kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah serta penilain atau evaluasi dari setiap

⁸⁹ Hasil wawancara dengan H. Chairul saleh, S.S. M.Pd Selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan pada hari senin 25 September 2017

anggaran kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan.

a. Evaluasi Keuangan Sekolah

Evaluasi merupakan proses penilaian dalam pencapaian tujuan, artinya menilai pelaksanaan proses pengelolaan keuangan yang terjadi di sekolah, menilai pencapaian sasaran program, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

Pada tahap evaluasi anggaran, sekolah membuat laporan keuangan untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Kepala Keuangan bahwa laporan keuangan disampaikan ke yayasan.⁹⁰

Dengan adanya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban sekolah kepada yayasan, pihak sekolah harus memiliki sistem informasi manajemen dan memonitoring hasil yang telah dicapai. Sistem informasi manajemen tersebut berupa laporan keuangan dalam memberikan hasil evaluasi anggaran. Hal tersebut senada dengan penjelasan Kepala Keuangan, beliau mengatakan bahwa ... dengan adanya SOP, proses mendapatkan dana, penggunaan dana, di situ menjadi bahan pengambilan keputusan.⁹¹

Senada dengan pendapat Kepala Sekolah, beliau mengatakan bahwa sistem informasi manajemen dalam memberikan hasil evaluasi anggaran, beliau mengatakan bahwa:

⁹⁰ Hasil wawancara dengan kepala keuangan sekaligus bendahara ibu desi apriana, S.E, M.Pd pada 28 september 2017

⁹¹ Hasil wawancara dengan kepala keuangan sekaligus Bendahara Ibu Desi Apriana, S.E, M.Pd Pada 28 September 2017

“..., dengan adanya laporan keuangan sebagai bahan evaluasi anggaran sekolah yang diketahui oleh pihak internal saja dan sebagai bahan pengambilan keputusan.”⁹²

Sedangkan monitoring terhadap hasil pengelolaan anggaran dilakukan oleh pihak yayasan dan manajemen sekolah terhadap laporan keuangan setiap satu tahun. Laporan keuangan sekolah terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan equitas, perubahan arus kas, analisa laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan daftar aktiva tetap. Laporan keuangan sekolah dapat dilihat pada lampiran no.11. Serta laporan pertanggungjawaban sekolah yang dilakukan setiap bulan. Dan monitoring penggunaan dana BOS disampaikan setiap triwulan untuk dana BOS Pusat dan BOS Kabupaten/Kota, serta dana BOS Provinsi dilaporkan per semester. Pihak sekolah mengirimkan laporan berupa Form BOS K-1, K-2, K-3, K-7 dan K-7 a kepada TIM Manajemen BOS Kabupaten/Kota yaitu, UPT (Unit Pelaksana Teknis) SMP Kota Bandar Lampung.

Terlihat dengan jelas pada tabel 10 alokasi anggaran yang berpihak pada upaya peningkatan kualitas pendidikan menjadi hal yang sangat prioritas dan penting, seperti pelibatan guru-guru dan kepala sekolah dalam MGMP dan MKKS, studi banding, pelatihan/workshop/seminar, gaji dan kesejahteraan pegawai, pemenuhan perlengkapan KBM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 4.11. Rincian anggaran dan kegiatan SMP AI Kautsar Tahun 2016

No	Kode Mata	Uraian	Satuan	Anggaran (Rp)
----	-----------	--------	--------	---------------

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Sri purwaningsih sebagai Kepala Sekolah SMP AL-Kautsar Bandar Lampung. Pada, 28 September 2017.

	Anggaran			
1	5601	MGMP & MKKS	1 tahun	7.400.000
2.	5602	Pelatihan/Workshop/Seminar	1 tahun	21.907.000
3.	5604	Studi Banding	1 event	7.500.000
4.	5100	Gaji dan kesejahteraan pegawai 1. Tunjangan 2. Tunjangan lauk pauk 3. Tunjangan transport	1 tahun	2.158.124.655
5.	5104	Honor kegiatan 1. Finalisasi pengisian data raport siswa 2. Pengisian nilai raport	2 smstr	2.200.000
6.	5108	Tunjangan Hari Raya Guru Bimbel	10 org	1.750.000
7.	5607	Buka Puasa Bersama	60 org	1.500.000
8.	5608	Halal Bi Halal	80 org	900.000
9.	5611	Lomba Guru dan Karyawan	1/event	1.000.000
10.	1606	Pengadaan Mebeler		22.940.000
11.	1608	Pengadaan Peralatan Kantor		4.200.000

Sumber : APBY Al Kautsar – Thn 2016 Hal 47-49

Dari kode mata anggaran yang tersajikan gaji dan kesejahteraan pegawai menduduki peringkat pertama dengan alokasi anggaran Rp.2.158.124.655.00,- hal itu dapat dimaklumi sebab pola penggajian yang dilakukan oleh SMP Al Kautsar tidak menganut pola penggajian kerja sebulan di gaji seminggu, melainkan kerja sebulannya di gaji sebulan seperti sistem penggajian PNS, sehingga rata-rata pendapatan guru baik yang honorer maupun yayasan di atas Rp. 1.000.000.00,-

Setiap guru tidak hanya mendapat gaji mengajar atau gaji tatap muka, akan tetapi mendapatkan tambahan dan kerja-kerja tambahan yang dilakukan seperti : honor guru pengganti, honor ekstra agama, kelebihan jam mengajar, kemudian ada juga tunjangan-tunjangan mulai dari tunjangan profesi, tunjangan lauk pauk, tunjangan transport hingga honor kegiatan⁵. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 4.12. Gaji dan kesejahteraan pegawai di SMP Al Kautsar

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Gaji dan Kesejahteraan Pegawai				
	Gaji (Januari – Juni)	7	Bulan	124.015.818	872.952.052
	Gaji (Juli – Desember)	6	Bulan	119.015.818	774.094.908
	Honor Guru Pengganti	3	Bulan	5.294.000	15.882.000
	Honor Ekstra Agama	10	Bulan	4.320.000	43.200.000
	Kelebihan Jam Mengajar	10	Bulan	127.000	1.270.000
2.	Tunjangan				
	Wali Kelas Unggul/Plus (6 org x Rp.75.000)	13	Bulan	450.000	5.850.000
	Wali Kelas Reguler (18 org x Rp.50.000)	13	Bulan	900.000	11.700.000
	Koordinator Lab (4 org x 50.000)	13	Bulan	200.000	2.600.000
	Staff Waka (3 org x 200.000)	13	Bulan	600.000	7.800.000
	Kesehatan (56 org x Rp.65.000)	12	Bulan	3.510.000	42.120.000
	Jamsostek	12	Bulan	5.211.122	62.533.464
	Pensiun	12	Bulan	1.564.000	18.768.000

⁵ APBY Al Kautsar – Thn 2013 Hal 47-49

	Lauk Pauk (42 org x 25 hr x Rp. 10.000)	11	Bulan	10.500.000	115.500.000
	Transport (07 org x 25 hr x Rp.10.000)	11	Bulan	1.750.000	19.250.000
3	Honor Kegiatan				
	Finalisasi pengisian data raport siswa (3 tkt x 8 kls x Rp.40.000)	2	Smt	960.000	1.920.000
	Pengisian nilai raport siswa (3 tkt x 8 kls x Rp.40.000)	2	Smt	1.800.000	3.600.000
	Pembuatan perangkat pembelajaran (3 tkt x 18 MP)	54	Set	125.000	6.750.000

Sumber : APBY Al Kautsar – Thn 2016 hal 48.

Besarnya alokasi anggaran bagi kesejahteraan guru, berdampak signifikan terhadap kinerja dan loyalitas yang ditunjukkan oleh para tenaga pendidik. Dari 20 orang guru yang disurvei semuanya atau 100% responden lebih memilih menjadi guru tetap yayasan (GTY) dibanding harus menjadi tenaga honorer disekolah negeri yang berpeluang diangkat menjadi PNS atau ikut serta dalam tes CPNS itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa insentif berdampak kepada inisiatif.

2 Penerapan Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi mengenai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sekolah, merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam menjalankan undang-undang sistem pendidikan nasional tentang pengelolaan dana pendidikan. Pengelolaan dana

pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan di sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah.

Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, peneliti melakukan metode wawancara dan studi dokumen dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah, Yaitu Ketua Yayasan Pendidikan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, Kepala Keuangan sekaligus Bendahara SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung. Wawancara juga dilakukan dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan untuk mengkonfirmasi dengan program/kegiatan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan.

Dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung telah memiliki SOP tentang pengelolaan keuangan, namun SOP pengelolaan keuangan tersebut masih bersifat internal. Dari studi dokumen mengenai SOP, peneliti hanya dapat meringkas tentang sub bab SOP, yaitu a) sistem penganggaran, b) sistem penerimaan, c) sistem pengelolaan bon sementara, d) prosedur pengelolaan hutang dan piutang, e) sistem pembayaran biaya personil, f) prosedur pengadaan barang dan jasa, g) sistem pengelolaan kas kecil (*petty cash*). Di dalam SOP tersebut juga terdapat tabel yang menjelaskan uraian prosedur, pelaksana, dan dokumen yang digunakan

dalam melaksanakan kegiatan anggaran.

Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan yang dilaksanakan. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung membangun kepercayaan Masyarakat dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan kegiatan siswa setiap tahunnya, tentunya dengan memberikan informasi anggaran yang harus dibayarkan siswa pertahun. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Kepala Sekolah SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, bahwa keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran sekolah, yaitu:

“Iya, kita terbuka terhadap Warga sekolah yang berkepentingan, yaitu melibatkan Tim manajemen dan yayasan dalam merencanakan biaya pendidikan peserta didik dalam satu tahun ajaran, guru dan karyawan mengajukan kebutuhan selama satu tahun dan membuat daftar usulan anggaran kegiatan, dan komite sekolah dalam merencanakan anggaran dana komite sesuai dengan kebutuhan kegiatan siswa. Kalau dari pihak eksternal, yaitu pemerintah (UPT Kota Bandar Lampung) hanya sebatas dana BOS yang perencanaannya dilakukan dalam 3 bulan sekali.”⁹³

Sedangkan keterbukaan dalam proses pelaksanaan anggaran di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, dijelaskan oleh kepala Keuangan bahwa:

“Iya, secara langsung melibatkan guru, karyawan dan komite sekolah. Mereka melaksanakan anggaran kegiatan yang telah diusulkan kepada atasan, membelanjakan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan program kegiatan sekolah, dan membuat laporan pertanggungjawaban disertai kuitansi atau bukti fisik.”⁹⁴

Keterbukaan yang dilakukan oleh SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dimaksudkan, untuk memberikan informasi

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Sri purwaningsih sebagai Kepala Sekolah SMP AL-Kautsar Bandar Lampung. Pada, 28 September 2017.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan kepala keuangan sekaligus Bendahara Ibu Desi Apriana, S.E, M.Pd Pada 20 September 2017

anggaran dana yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Sehingga memberikan pemahaman kepada guru, karyawan, dan orang tua siswa serta saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung hanya mempunyai auditor internal, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri purwaningsih, bahwa SMP Al-Kautsar Bandar Lampung memiliki audit internal, biasanya audit dilakukan pada bulan Maret, proses dalam mengaudit laporan keuangan, yaitu Tim audit melihat laporan keuangan dan mewawancarai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, yaitu direktur dan kepala keuangan dan pihak yang menerima hasil audit keuangan adalah yayasan.

Manfaat penting dari adanya transparansi anggaran yaitu meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. Di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung kebijakan anggaran yang dikeluarkan adalah biaya kenaikan gaji guru dan karyawan serta kenaikan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Hal tersebut sesuai dengan penuturan kepala sekolah bahwa kebijakan anggaran sekolah yang diumumkan kepada Warga sekolah mengenai:

“kenaikan gaji dan SPP. Dalam rapat rutin guru dan karyawan terkait pengajian atau keuangan. Sedangkan SPP pada tahun ajaran baru melalui surat.”⁹⁵

Kebijakan mengenai kenaikan gaji di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, dikarenakan adanya keputusan kenaikan gaji setiap tahunnya dari sekolah atau pengajuan kenaikan gaji yang dilakukan oleh guru dan karyawan dengan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sri purwaningsih sebagai Kepala Sekolah SMP AL-Kautsar Bandar Lampung. Pada, 28 September 2017.

pertimbangan beban pekerjaan, inflasi dan kondisi kebutuhan ekonomi, sedangkan kebijakan kenaikan SPP siswa setiap 2-3 tahun sekali, naik sebesar Rp. 50.000,-. Hal tersebut senada dengan Salah satu orang tua siswa, beliau mengatakan bahwa biasanya 2-3 tahun tentang kenaikan SPP.”⁹⁶ Pihak sekolah melibatkan tim manajemen dalam rapat untuk membahas kenaikan SPP dan dan.

Kenaikan SPP diberitahukan kepada orang tua murid melalui surat edaran. Kenaikan tersebut dilakukan karena setiap tahun kebutuhan kegiatan siswa bertambah dan perubahan harga pasar. Tentunya dengan kebijakan kenaikan SPP, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung berusaha memberikan *output* yang berkualitas dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada seluruh siswa.

Dalam proses penganggaran, keterlibatan Semua Warga sekolah sangat diperlukan untuk belajar bertanggung jawab terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung memberikan kesempatan kepada Warga Sekolah untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran, terkait dengan bentuk partisipasi Warga Sekolah, Ibu Sri Purwaningsih selaku Kepala Keuangan mengatakan:

“Partisipasi dalam proses penganggaran bisa berbentuk keterlibatan langsung dalam proses penganggaran, usulan kegiatan, saran dan kritik yang membangun, dukungan moral dan materi.”⁹⁷

Pemberian kesempatan kepada Warga Sekolah untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran disepakati oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum

⁹⁶ Hasil wawancara dengan salah satu Orang tua Siswa SMP AL-Kautsar Bandar Lampung. Pada, 2 Oktober 2017.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sri purwaningsih sebagai Kepala Sekolah SMP AL-Kautsar Bandar Lampung. Pada, 28 September 2017.

yang berpendapat bahwa bentuk partisipasi Warga Sekolah berupa usulan dan saran yang disampaikan ke sekolah baik dari guru dan orang tua mengenai kegiatan sekolah.”⁹⁸

Senada dengan pendapat Ibu Sri purwaningsih selaku Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, bahwa pemberian partisipasi Warga sekolah dalam proses penganggaran. Beliau mengatakan:

“..., partisipasi guru dan karyawan dalam bentuk pengajuan kebutuhan media/sumber belajar, operasional sekolah, dan kebutuhan kegiatan siswa. Mereka mengajukan kebutuhan tersebut ke atasan dengan dana/anggaran yang dicantumkan. Setelah itu, mereka membuat proposal atau bon sementara untuk melakukan pembelian barang/jasa serta membuat laporan pertanggungjawaban atau menyerahkan struk pembayaran ke bagian keuangan.”⁹⁹

Dari adanya pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa SMP Al-Kautsar Bandar Lampung memberikan kesempatan kepada warga sekolah dalam proses anggaran dengan adanya keterlibatan guru, karyawan, dan orang tua dalam kebutuhan proses belajar mengajar dan kegiatan yang akan dilakukan sekolah.

Dengan adanya partisipasi warga sekolah dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam proses penganggaran serta meningkatkan kepercayaan warga sekolah kepada sekolah. Wawasan dan pengetahuan yang didapat oleh warga sekolah dijelaskan oleh Kepala Keuangan, bahwa:

“..., mereka belajar mengenai peraturan keuangan, bagaimana cara membuat proposal yang dibutuhkan, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”¹⁰⁰

⁹⁸ Hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang Kurikulum pada hari senin 25 September 2017

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri purwaningsih sebagai Kepala Sekolah SMP AL-Kautsar Bandar Lampung. Pada, 28 September 2017.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan kepala keuangan sekaligus Bendahara Ibu Desi Apriana, S.E, M.Pd Pada 20 September 2017

Namun penjelasan kepala sekolah, mengatakan bahwa dengan adanya partisipasi Warga sekolah dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap pengelolaan keuangan, dengan:

“..., misalnya dengan pengalaman guru-guru dalam kegiatan *fieldtrip*, mereka tau bahwa dana yang dibutuhkan besar, sehingga mereka dapat menyesuaikan anggaran dengan paket kegiatan yang akan dipilih.”¹⁰¹

Hal tersebut dapat diartikan bahwa, peningkatan wawasan dan pengetahuan dengan adanya keterlibatan Warga Sekolah dalam proses penganggaran, yaitu guru, karyawan, dan komite dapat menentukan anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

Serta meningkatkan kepercayaan Masyarakat dengan adanya keterbukaan dalam proses anggaran dikemukakan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, beliau mengatakan bahwa:

“..., misalkan saja adanya dukungan dan kepercayaan dari orang tua dalam membantu dana yang kurang dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan sekolah.”¹⁰²

Lebih lanjut Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, beliau mengatakan bahwa dengan adanya kepercayaan Warga Sekolah dalam proses penganggaran:

“..., khususnya internal yaitu direktur, guru dapat mengetahui keadaan keuangan yang terealisasi sesuai dengan budget sekolah. Orang tua terkait dana UKT dapat mengetahui dana yang dikeluarkan untuk kegiatan apa saja.”¹⁰³

Kepercayaan tersebut tentunya sangat dibutuhkan oleh sekolah maupun masyarakat. Dari adanya kepercayaan masyarakat, sekolah dapat bekerja sama

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri purwaningsih sebagai Kepala Sekolah SMP AL-Kautsar Bandar Lampung. Pada, 28 September 2017.

¹⁰² Hasil wawancara dengan H. Chairul saleh, S.S. M.Pd selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan pada hari senin 25 September 2017

¹⁰³ Hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum pada hari senin 9 September 2017

dan dapat meminimalisir tindak penyimpangan atau korupsi yang dilakukan oleh sekolah.

Penerapan prinsip transparansi di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung kepada pemerintah dapat dilihat dengan adanya pembayaran pajak. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, yaitu jenis pajak penghasilan atau PPh Pasal 21. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Keuangan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung bahwa:

“Pajak yang dibayarkan atau dipotong hanya untuk guru dan karyawan yang pendapatan atau gajinya di atas Rp. 3.000.000 di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung membayar pajak tersebut melalui bank atau kantor POS paling lambat tanggal 10 dan melaporkan SPT (surat pemberitahuan) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya ke kantor pajak pratama Bandar Lampung.”¹⁰⁴

Hal tersebut senada dengan informasi yang diberikan oleh Ibu Sri purwaningsih selaku Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, beliau mengatakan pajak yang dibayarkan oleh sekolah adalah jenis pajak PPh 21, yaitu pajak penghasilan dari gaji guru dan karyawan, di sekolah tidak semua guru dan karyawan membayar pajak. Menurut aturan pemerintah hanya penghasilan Rp. 3.000.000 dapat dikenakan pajak.¹⁰⁵

Dengan adanya pembayaran pajak PPh 21 penghasilan, merupakan wujud keterbukaan sekolah kepada pemerintah mengenai pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh sekolah.

Penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik, dengan adanya kerangka

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan kepala keuangan sekaligus Bendahara Ibu Desi Apriana, S.E, M.Pd Pada 20 September 2017

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sri purwaningsih sebagai Kepala Sekolah SMP AL-Kautsar Bandar Lampung. Pada, 28 September 2017.

kerja yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari setiap penanggungjawab kegiatan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung memberikan informasi anggaran dana kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran, untuk memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan khususnya pihak internal yaitu yayasan, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung telah memiliki audit internal. Keputusan anggaran untuk kenaikan gaji guru dan karyawan dan SPP merupakan bentuk keterbukaan sekolah kepada Masyarakat

3. Perencanaan Keuangan Sekolah

Perencanaan penyusunan keuangan atau anggaran pendidikan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung menggunakan pendekatan PPBS (*Planning Programming Budgeting System*). PPBS merupakan perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan program/kegiatan dari masing-masing unit yang ada di sekolah. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung menggunakan pendekatan PPBS yang dapat dilihat dari adanya rapat kerja yang dilakukan sekolah setiap awal tahun ajaran. Dalam rapat tersebut membahas program/kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran dan menentukan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan bahwa dalam rapat, menyusun program dan anggaran selama satu tahun ajaran.¹⁰⁶

Keterbukaan dalam perencanaan keuangan dilakukan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, yaitu dengan membuat RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan H. Chairul saleh, S.S. M.Pd Selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan pada hari senin 25 September 2017

Sekolah) yang dibuat pada tahun ajaran baru, proses pembuatan RKAS menggunakan sistem *bottom up*, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan karyawan) dan disetujui oleh atasan yaitu Kepala Sekolah, Yayasan Pendidikan, dan Kepala Keuangan. Sesuai dengan penuturan Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung:

“RKAS dibuat sebelum tahun ajaran, membuat draft pada bulan April, dan *final*-nya pada bulan Mei-Juni. Dalam pembuatan RKAS yang terlibat adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bagian umum, bagian keuangan, dan guru. Proses pembuatan RKAS yaitu mengidentifikasi kebutuhan, prioritas kegiatan/program, mencari kisaran dana yang dibutuhkan, dan disetujui oleh atasan, serta melakukan pengawasan.”¹⁰⁷

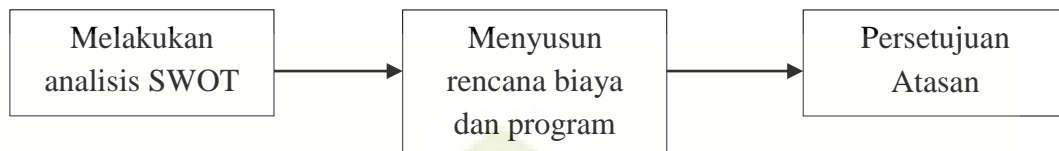
Penyusunan RKAS memperhatikan estimasi pengeluaran anggaran dan kebutuhan program/kegiatan di sekolah. Dalam proses pembuatan RKAS menerapkan prinsip transparansi untuk memberikan kepercayaan Warga sekolah (guru dan karyawan) dalam pengelolaan anggaran. RKAS disusun sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan, yaitu pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar biaya, dan pengembangan dan implementasi sistem penilaian.

Pembuatan RKAS di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung merupakan bentuk transparansi dalam proses perencanaan anggaran sekolah kepada Masyarakat. Dalam perencanaan anggaran pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, karyawan, dan komite yang membuat rencana anggaran sesuai dengan kegiatan

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sri purwaningsih sebagai Kepala Sekolah SMP AL-Kautsar Bandar Lampung. Pada, 28 September 2017.

dan kebutuhan sekolah. Adapun alur perencanaan anggaran dapat dilihat di bawah ini:

Bagan 4.2



Alur Perencanaan Anggaran

Pihak manajemen (Kepala Sekolah dan Yayasan) melakukan analisis SWOT (*Strenghts, Weaknees, Opportunities, Threats*) untuk menaksir biaya pendidikan yang akan dikeluarkan selama satu tahun ajaran. Setelah melakukan analisis, pihak guru dan karyawan melakukan rencana biaya dan kegiatan/program yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. itu, pengajuan rencana dana kebutuhan dan kegiatan nantinya disetujui oleh atasan yaitu Yayasan, Kepala Sekolah, dan Kepala Keuangan.

Dalam perencanaan keuangan sekolah membahas seluruh program/kegiatan dan kebutuhan sekolah. Program/kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan mutu siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan menyokong kebutuhan operasional sekolah.

Dari hasil penelitian mengenai penerapan prinsip transparansi pada perencanaan keuangan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dapat disesuaikan dengan teori yang ada di bab sebelumnya, dimana keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi Warga sekolah dalam proses perencanaan keuangan. Keterlibatan Warga sekolah dalam membuat RKAS

merupakan bentuk partisipasi yang mencerminkan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Proses pembuatan RKAS merupakan usulan dari bawah atau bersifat *bottom up*, proses tersebut memberikan kesempatan kepada guru dan karyawan untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan rencana anggaran.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan keuangan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung sudah cukup baik, yaitu adanya keterlibatan tim manajemen, yayasan, guru, karyawan, dan komite dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan yang diusulkan kepada atasan, serta sesuai dengan standar operasional prosedur sekolah.

4 Pelaksanaan Keuangan Sekolah

Pengelolaan pelaksanaan keuangan atau anggaran di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung terdiri dari mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja serta dapat membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

SMP Al-Kautsar Bandar Lampung menginput data keuangan menggunakan *software* akuntansi yang bernama *Peachtree* dan memiliki dua bentuk pembukuan, yaitu buku kas dan buku bank. Buku kas merupakan pembukuan untuk mencatat pemasukan dana dan pengeluaran dana yang dilakukan dalam setiap kegiatan dan pencairan dana, sedangkan buku bank merupakan pembukuan sekolah untuk merekonsiliasikan catatan keuangan di sekolah dengan di bank.

Adapun bentuk buku kas dan buku bank di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.13
BUKU KAS/BANK

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,

Kepala Sekolah

(.....)

Bendahara

(.....)

Anggaran pembelanjaan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung terdiri atas pengeluaran berbagai program sekolah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai terdiri atas pengeluaran gaji guru dan karyawan. Belanja barang dan jasa terdiri atas pengeluaran buku siswa, seragam, promosi, kegiatan guru dan karyawan. Belanja modal terdiri atas inventaris gedung, AC, Furnitur, peralatan umum, dan mobil operasional sekolah, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sri Purwaningsih selaku kepala keuangan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung.¹⁰⁸

Tabel 4.14

**Realisasi Pengeluaran Dana SMP Al-Kautsar Bandar Lampung TA
2016/2017**

No.	Uraian	Rencana	Realisasi
1.	Gaji guru dan karyawan	1.520.000.000	1.316.320.000

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri purwaningsih sebagai Kepala Sekolah SMP AL-Kautsar Bandar Lampung. Pada, 28 September 2017.

2.	Renovasi lantai 3 dan 4	400.000.000	400.000.000
3.	Kegiatan guru dan karyawan	148.150.000	130.789.000
4.	Pembayaran Rek. Listrik, tlp, internet	96.000.000	95.500.000
5.	Ekstrakurikuler	82.650.000	82.560.000
6.	Karyawisata	65.087.000	49.000.000
7.	Gaji konsultan psikolog	36.000.000	36.000.000
8.	Unit activity	31.400.000	35.000.000
9.	Pentas akhir tahun	30.240.000	65.000.000
10.	Sarana KBM	29.000.000	26.000.000
11.	Perpisahan	21.600.000	19.567.000
12.	Snack guru dan karyawan	25.440.000	36.000.000
13.	Program semester	13.000.000	16.000.000
14.	Pengadaan media pembelajaran	12.000.000	13.500.000
15.	Operasional	65.087.000	70.500.000
Jumlah		2.575.654.000	2.391.736.000

Realisasi pengeluaran dana tahun ajaran 2016/2017 pada post pengeluaran 15 terbesar, yaitu: (a) gaji guru dan karyawan sebesar Rp. 1.316.320.000 dengan realisasi pembayaran gaji guru perbulan berkisar antara Rp. 2.300.000 – Rp. 4.000.000 dengan jumlah guru sebanyak 21 orang, sedangkan untuk gaji karyawan Rp 1.500.000 – Rp. 2.500.000 dengan jumlah karyawan sebanyak 22 orang. Apabila dibandingkan dengan rencana pengeluarannya, sekolah menganggarkan sebesar Rp. 1.520.000.000 berbeda lebih besar dari pada realisasinya. Sumber dana tersebut berasal dari SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) (b) Pengeluaran anggaran renovasi sebesar Rp. 400.000.000. Jumlah pengeluaran tersebut tidak mengalami perubahan dengan yang direncanakan. Pengeluaran dana renovasi merupakan dana kontribusi sekolah dan selebihnya

memakai dana yayasan. (c) Pengeluaran kegiatan guru dan karyawan sebesar Rp. 130.789.000, sumber dana kegiatan guru dan karyawan berasal dari sekolah. (d) Pembayaran rekening listrik, telepon, internet Rp. 95.500.000.

Apabila dibandingkan dengan rencana anggaran sebelumnya sebesar Rp. 96.000.000, terdapat perbedaan lebih kecil dari yang direncanakan. Sumber dana tersebut berasal dari dana BOS dan sekolah. (e) Ekstrakurikuler berasal dari uang siswa, pengeluarannya sesuai dengan perencanaannya yaitu sebesar Rp. 82.560.000. (f) Karyawisata menghabiskan dana sebesar Rp. 49.000.000. Dana tersebut lebih besar dari rencananya yaitu sebesar Rp. 36.000.000. Dana tersebut berasal dari dana UKT (Uang Kegiatan Tahunan). Realisasi lebih besar dikarenakan kondisi harga di lapangan yang mengalami perubahan diluar perencanaan. (g) Gaji konsultasi psikolog tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 36.000.000. Dana tersebut berasal dari dana sekolah. (h) *Unit activity* menghabiskan dana Rp. 35.000.000. Dana tersebut lebih besar dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 31.400.000. Dana tersebut berasal dari dana UKT. (i) Pentas Akhir Tahun (PAT) menghabiskan dana Rp. 65.000.000. Dana tersebut lebih besar dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 30.240.000. Dana tersebut berasal dari UKT, dan sponsor. (j) Sarana KBM menghabiskan dana Rp. 26.000.000. Dana tersebut lebih kecil dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 29.000.000. Dana tersebut berasal dari dana UKT. (k) Perpindahan menghabiskan dana Rp. 19.567.000. Dana tersebut lebih kecil dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 21.600.000. Dana tersebut berasal dari dana UKT. (l) Snack guru dan karyawan menghabiskan dana sebesar Rp. 36.000.000. Dana tersebut lebih besar

dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 25.440.000. Dana yang digunakan berasal dari dana sekolah. (m) Kegiatan program semester menghabiskan dana Rp. 16.000.000. Dana tersebut lebih besar dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 13.000.000. Dana tersebut berasal dari dana sekolah. (n) Pengadaan media pembelajaran menghabiskan dana Rp. 13.500.000. Dana tersebut lebih besar dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 12.000.000. Dana tersebut berasal dari dana sekolah. (o) Operasional menghabiskan dana Rp. 70.500.000. Dana tersebut lebih besar dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 65.087.000. Dana tersebut berasal dari dana sekolah. Perencanaan pengeluaran dana lebih besar dari realisasi dengan selisih Rp. 183.918.000. Selisih dana tersebut dipindahkan pada post pengeluaran yang realisasinya lebih besar.

Pada tahap pelaksanaan anggaran, keterbukaan atau transparansi yang diterapkan di sekolah adalah dengan adanya keterlibatan guru, karyawan, dan komite sekolah dalam pembuatan proposal dan membuat laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan/program sekolah. SMP Al-Kautsar Bandar Lampung yang merupakan sekolah swasta yang memiliki sumber pendapatan dari orang tua dan pemerintah (dana BOS), memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan kepada orang tua dan pemerintah terkait dana BOS. Laporan keuangan kepada orang tua berbentuk surat edaran Seperti yang diutarakan oleh Kepala SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, beliau mengatakan ..., jadi, laporan keuangan dari dana Yayasan tersebut diberikan kepada seluruh orang

tua siswa.¹⁰⁹

Sedangkan penuturan dari Ibu Desi Apriana, S.E.M.Pd sebagai Kepala Keuangan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, bahwa laporan keuangan disampaikan kepada pihak internal sekolah:

“melalui laporan keuangan dan LPJ (laporan pertanggungjawaban) keuangan yang disampaikan ke yayasan, serta ke pemerintah terkait dana BOS.”¹¹⁰

Dalam mengajukan anggaran, setiap pelaksana kegiatan (guru dan karyawan) harus membuat proposal kegiatan dan mengisi lembar permintaan dana kegiatan, barang/jasa (bukti transaksi sementara). Lembar permintaan dana harus diotorisasi oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kepala Keuangan. Adapun alur permintaan dana, yaitu:

Bagan 4.3
Alur Permintaan Dana



(Sumber: Diolah dari Standar Operasional Prosedur SMP Al-Kautsar Bandar Lampung).

Dalam alur permintaan dana di atas, menjelaskan bahwa untuk

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri purwaningsih sebagai Kepala Sekolah SMP AL-Kautsar Bandar Lampung. Pada, 28 September 2017.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan kepala keuangan sekaligus Bendahara Ibu Desi Apriana, S.E, M.Pd Pada 20 September 2017

melaksanakan kegiatan yang sudah tertera di RKAS, para penanggung jawab kegiatan harus membuat proposal kegiatan, beserta dana yang dibutuhkan pada bukti transaksi sementara. Proposal dan dana pada bukti transaksi sementara diajukan kepada Kepala Keuangan sekaligus Bendahara sekolah, setelah dana keluar pihak atasan melakukan pengawasan dalam terlaksananya kegiatan sesuai tujuan. Setelah kegiatan terlaksana para penanggung jawab harus membuat laporan pertanggungjawaban dalam kurun waktu 1 minggu. Adapun format proposal yang digunakan dimulai dari latar belakang, bentuk kegiatan, tujuan kegiatan, waktu dan tempat, deskripsi kegiatan, susunan panitia, anggaran dana. Sedangkan laporan pertanggungjawaban kegiatan terdiri dari evaluasi kegiatan, saran, penutup, rencana anggaran dana, dan bukti transaksi serta kuitansi.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan keuangan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung, yaitu dengan adanya pengajuan proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik, yaitu

- a. Prinsip-prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SMP Al-kautsar Bandar Lampung. adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai yayasan, tim manajemen sekolah, guru, karyawan, dan komite dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka sesuai dengan standar operasional prosedur SMP Al-Kautsar Bandar Lampung.
- b. Prinsip-prinsip transparansi Pengelolaan Keuangan SMP Al-kautsar Bandar Lampung. Penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik, dengan adanya kerangka kerja yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari setiap penanggungjawab kegiatan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung memberikan informasi anggaran dana kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran, untuk memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan khususnya pihak internal yaitu yayasan, SMP Al-

Kautsar Bandar Lampung telah memiliki audit internal. Keputusan anggaran untuk kenaikan gaji guru dan karyawan dan SPP merupakan bentuk keterbukaan sekolah kepada Masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis dapat memberikan saran, sebaiknya sekolah:

1. Memberikan informasi kepada seluruh guru dan karyawan sekolah mengenai rencana anggaran kegiatan sekolah secara menyeluruh, realisasi anggaran, dan evaluasi anggaran melalui rapat/musyawarah kerja.
2. Bekerjasama dengan pihak audit eksternal atau independen dalam mengaudit laporan keuangan SMP Al-Kautsar Bandar Lampung untuk lebih meningkatkan *trust* (kepercayaan) Masyarakat.
3. Memiliki pembukuan yang lebih lengkap mulai dari Buku Pos, Jurnal, Buku Besar, Buku Kas Piutang, dan Neraca Percobaan.
4. Memiliki media seperti papan pengumuman untuk memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran sekolah kepada Warga Sekolah terkait dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).